



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi pembangunan daerah dan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu indikator perangkat daerah;
 - b. untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa perubahan dimaksud dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pelaksanaan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode I (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024, adalah Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- (3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024;
- (4) Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2024;
 - c. bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI Penutup.
- (5) Isi dan Uraian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2024

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 24 Juli 2024

2 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 28

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024**

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I: PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-2

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... I-3

1.4. Maksud dan Tujuan I-4

1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... I-4

BAB II: EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN (..... II-1

1. Evaluasi Kinerja Pendapatan II-1

2. Evaluasi Kinerja Belanja..... II-2

3. Evaluasi Kinerja Pembiayaan Daerah II-3

4. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-18

1). Evaluasi SPM Bidang Pendidikan II-18

2). Evaluasi SPM Bidang Kesehatan II-19

3). Evaluasi SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-30

4). Evaluasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman II-35

5). Evaluasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-38

6). Evaluasi SPM Bidang Sosial II-44

5. Evaluasi Kinerja RPJMD II-51

6. Evaluasi Capaian Kinerja Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Ende II-51

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II-53

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi..... III-1

3.1.1. Perkembangan Perekonomian Global III-1

3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional III-2

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Makro Regional NTT III-5

3.1.4. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ende III-7

3.2. Perubahan Kerangka Pendanaan III-9

3.2.1 Pendapatan Daerah III-9

3.2.2 Belanja Daerah III-11

3.2.3 Pembiayaan Daerah III-13

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende IV-1

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 IV-3

 4.2.1. Sasaran Pembangunan IV-3

 4.2.2. Perumusan Prioritas Pembangunan IV-3

 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2024 IV-6

 4.2.4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi IV-8

 4.2.5. Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Produk Lokal IV-8

BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

BAB VII: PENUTUP VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 II-18

Gambar 2.2. Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023)..... II-19

Gambar 2.3. Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023) II-30

Gambar 2.4. Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023) II-35

Gambar 2.5 Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2023 II-38

Gambar 2.6 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial II-44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Daerah s/d Semester I II-1

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Daerah Semester I II-2

Tabel 2.3. Realisasi Belanja pada masing-masing Perangkat Daerah Kondisi sampai dengan Akhir
Bulan Juni 2024 II-5

Tabel 2.4. Realisasi Belanja Per Masing-Masing Misi Pembangunan Kondisi sampai dengan Akhir
Bulan Juni 2024 II-11

Tabel 2.5. Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan Kondisi Tahun 2023 II-18

Tabel 2.6. Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Kondisi Tahun 2023 II-20

Tabel 2.7. Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kondisi Tahun 2023 II-31

Tabel 2.8. Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kondisi
Tahun 2023 II-36

Tabel 2.9. Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kondisi Tahun 2023 II-39

Tabel 2.10 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial Kondisi Tahun 2023 II-45

Tabel 2.11. Target Makro Perubahan RPJMD 2019-2024 dan Capaian sampai dengan Tahun 2023 II-51

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2023) II-52

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 menurut Perangkat Daerah
kondisi sampai dengan Tahun 2023 II-53

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023 III-8

Tabel 3.2. Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2024 III-10

Tabel 3.3. Proyeksi Perubahan Belanja Tahun 2024 III-12

Tabel 3.4. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2024 III-13

Table 3.5. Perubahan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 III-14

Tabel 4.1. Hubungan Visi Misi RPJMD 2019-2024 dengan arahan RPJP 2005-2025 IV-1

Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende IV-2

Tabel 4.3. Target Capaian Indikator Makro Tahun 2024 IV-3

Tabel 4.4. Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Pusat IV-6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TOP DOWN PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ENDE TAHUN 2024
- Lampiran 2: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN USULAN TAHUN 2024
- Lampiran 3: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD TAHUN 2024



Bagian ini merupakan pengantar dengan substansi pokok uraian kedudukan Perubahan RKPD 2024 dalam konteks perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende, dasar hukum dilaksanakannya perubahan RKPD 2024, maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 serta sistematika penulisannya.

1.1. Latar Belakang

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun substansi dari Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 yang dilaksanakan ini berkaitan dengan:

- Penambahan/pengurangan subkegiatan;
- Perubahan Pagu Program/kegiatan/subkegiatan;
- Perubahan target: IKU RPJMD, IKD, IKU Renstra PD, IKK, Outcome, Output;
- Perubahan struktur anggaran daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan);
- Penyesuaian output khususnya pada subkegiatan terkait DAK, DBH DR, dan DBH CHT; dan
- Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru

Seturut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan aturan penjabarannya, dalam penerapannya pada proses perencanaan di daerah keseluruhan proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 ini, dilaksanakan berbasiskan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri RI.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengetasan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 630 Tahun 2023);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0116);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023, Nomor 21);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a) Menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan dan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024.

- b) Menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD ini, untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, serta perkembangan keadaan lainnya, sehingga target kinerja pembangunan yang ditetapkan dapat dijaga pencapaiannya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 disusun dengan Sistematika, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, memuat Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 kondisi sampai dengan triwulan II / semester pertama.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, berisi perkembangan ekonomi global, nasional, regional dan perkembangan ekonomi Kabupaten Ende, serta perubahan kerangka pendanaan.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam Perubahan RKPD, berisi tentang daftar kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VII Penutup, berisi Kaidah Pelaksanaan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)
TAHUN BERKENAN

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Ende kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 memuat gambaran realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Juni 2024. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan Perangkat Daerah disandingkan dengan laporan realisasi berdasarkan SP2D dan SPJ dari BPKAD untuk sinkronisasi terhadap data-data yang disampaikan, disamping memperhatikan perkembangan lain yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2023 Tentang APBD TA. 2024 tanggal 29 Desember 2023 (Lembaran Daerah Kab. Ende Tahun 2023 Nomor 5 tentang APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024), yang selanjutnya mengalami Revisi I berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 11 Juni 2024 bahwa ringkasan APBD Kabupaten Ende terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.275.130.090.254,- dengan pemenuhan kebutuhan Belanja Daerah sebesar Rp.1.296.330.608.011,-. Terhadap kondisi defisit ini dirumuskan Kebijakan Pembiayaan sebesar Rp.21.200.517.757,-.

Hasil RKPD atau dalam konteks anggaran merupakan Gambaran Realisasi APBD keadaan semester I (*keadaan sampai dengan Bulan Juni 2024*), diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Pendapatan

Pendapatan Daerah sampai dengan Bulan Juni 2024 terealisasi sebesar 24,76%, atau sebesar Rp.315.714.001.256,- dari target Pendapatan sebesar Rp. 1.275.130.090.254,- dengan rincian Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,37 persen, Pendapatan Transfer sebesar 33,53 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah sebesar 0,00 persen.

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah s/d Semester I (keadaan Juni 2024)

No. Rek	URAIAN	PAGU APBD 2024 (Revisi I)	REALISASI s/d JUNI 2024	LEBIH / (KURANG)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.275.130.090.254,0 0	315.714.001.256,0 0	959.416.088.998,0 0	24,7 6
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	82.597.537.249,00	8.566.045.143,00	74.031.492.106,00	10,3 7
4.1.01.	Pajak Daerah	33.138.224.500,00	5.127.199.050,00	28.011.025.450,00	15,4 7
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.638.548.000,00	1.608.430.244,00	4.030.117.756,00	28,5 3
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.225.557.093,00	0,00	2.225.557.093,00	0,00
4.1.04.	Lain - Lain PAD Yang Sah	41.595.207.656,00	1.830.415.849,00	39.764.791.807,00	4,40
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.177.558.479.593,0 0	307.147.956.113,0 0	870.410.523.480,0 0	33,5 3
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.137.169.532.000,0 0	297.801.276.077,0 0	839.368.255.923,0 0	33,1 4
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	929.185.296.000,00	297.801.276.077,0 0	631.384.019.923,0 0	32,0 5
4.2.01.05.	Dana Desa	207.984.236.000,00	0,00	207.984.236.000,0 0	0,00
4.2.02.	Pendapatan	40.388.947.593,00	9.346.680.036,00	31.042.267.557,00	0

	Transfer Antar Daerah				
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.388.947.593,00	9.346.680.036,00	31.042.267.557,00	23,14
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.974.073.412,00	0,00	14.974.073.412,00	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.974.073.412,00	0,00	14.974.073.412,00	-

Sumber Data: BPKAD Kab. Ende

2. Evaluasi Kinerja Belanja

Belanja Daerah dengan kondisi sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni 2024) terealisasi sebesar 18,76 persen, atau sejumlah Rp. 243.137.597.877,- dari target total Belanja sesuai Anggaran Kas pada Triwulan II, sejumlah Rp 1.296.330.608.011,-. Realisasi Belanja kondisi sampai dengan Triwulan II, dengan rincian:

- Belanja Operasi sebesar 26,53 persen atau sejumlah Rp. 223.548.440.013,- dari target sejumlah Rp. 842.561.622.971,-
- Belanja Modal sebesar 7,96 persen, atau sejumlah Rp. 13.741.846.148,- dari target sejumlah Rp. 172.647.998.190,-
- Belanja Tidak terduga sebesar 0,00 persen, atau sejumlah Rp. 0,- dari target sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan
- Belanja Transfer sebesar 2,09 persen, atau sejumlah Rp. 5.847.311.716,- dari target sejumlah Rp. 279.120.986.850,-.

Rincian kinerja Belanja selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Realisasi Belanja Daerah Semester I (keadaan Juni 2024)

No. Rek	URAIAN	PAGU APBD 2024 (Revisi I)	REALISASI s/d JUNI 2024	LEBIH / (KURANG)	%
5.	BELANJA DAERAH	1.296.330.608.011	243.137.597.877	1.051.193.010.134	18,76
5.1.	BELANJA OPERASI	842.561.622.971	223.548.440.013	619.013.182.958	26,53
5.1.01.	Belanja Pegawai	500.315.318.602	170.390.457.694,00	329.924.860.908	34,06
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	267.089.092.347	31.189.247.295,00	235.899.845.052	11,68
5.1.05.	Belanja Hibah	75.064.962.022	21.968.735.024,00	53.096.226.998	29,27
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	92.250.000	0,00	92.250.000	0,00
5.2.	BELANJA MODAL	172.647.998.190	13.741.846.148	158.906.152.042	7,96
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.204.860.135	3.661.188.648,00	32.543.671.487	10,11

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.270.054.736	3.575.936.300,00	52.694.118.436	6,35
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.903.334.254	5.664.564.000,00	67.238.770.254	7,77
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.258.649.065	840.157.200	6.418.491.865	11,57
	Belanja Modal Aset Lainnya	11.100.000	0,00	11.100.000	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	0,00	0,00	0,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	279.120.986.850	5.847.311.716	273.273.675.134	2,09
5.4	Belanja Bantuan Keuangan	279.120.986.850	5.847.311.716	273.273.675.134	2,09

Sumber Data: BPKAD Kab. Ende

3. Evaluasi Kinerja Pembiayaan Daerah

No. Rek	URAIAN	PAGU APBD 2024 (Revisi I)	REALISASI s/d JUNI 2024	LEBIH / (KURANG)	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.200.517.757	0	0	0
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.200.517.757	-	-	0,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	0	100
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	100
Pembiayaan Netto		21.200.517.757	5.000.000.000	0	-23,58
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Sumber Data: BPKAD Kab. Ende

Kinerja Pembiayaan Daerah sampai dengan Bulan Juni 2024, sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 0,00 persen, dari target total sebesar sebesar Rp. 26.200.517.757,-
- Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar 100 persen atau sebesar Rp.5.000.000.000,- dari target total sebesar Rp 5.000.000.000,-, dengan rincian:
 - Penyertaan Modal Daerah sebesar 100 persen atau sebesar Rp.5.000.000.000,- dari target total sebesar Rp 5.000.000.000,-.

Sementara terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pelaporan Perangkat Daerah, disajikan perhitungan capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- Tingkat capaian realisasi dilaksanakan dengan membandingkan Anggaran Kas sampai dengan Bulan Juni 2024
- Skala Nilai Peringkat dan Kategori Kinerja sebagai berikut:

Range Nilai Realisasi	Kategori
91 ≤ 100	Sangat Tinggi (ST)
76 ≤ 90	Tinggi (T)
66 ≤ 75	Sedang (S)
51 ≤ 65	Rendah (R)
≤50	Sangat Rendah

Gambaran selengkapnya realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2024 (kondisi sampai dengan semester I) untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai pelaporan sampai keadaan Semester I disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.3. Realisasi Belanja pada masing-masing Perangkat Daerah kondisi sampai dengan Akhir bulan Juni 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM. KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGORI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGAN / TOTAL APBD (%)	REALISAS I FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=8/6	11	12
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	19	136	364.637.765.354	357.501.121.592	87.753.567.754	24,55	24,07	24,07	SR
2	DINAS KESEHATAN			746	180.260.441.820	155.212.881.614	43.112.899.759	27,78	23,92	23,92	SR
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			16	43.332.245.750		9.485.076.147	0,00	21,89	21,89	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18	63	75.662.641.357	7.218.082.453.65 7	2.372.726.730	0,03	3,14	3,14	SR
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7	17	38	10.774.539.802	2.221.970.752	712.117.742	32,05	6,61	6,61	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	11	34	6.854.875.187	6.699.351.397	3.865.576.001	57,70	56,39	56,39	R
7	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA ALAM DAN DAERAH	2	11	40	4.100.524.823	4.100.524.823	811.574.650	19,79	19,79	19,79	SR

Tabel 2.3. Realisasi Belanja pada masing-masing Perangkat Daerah kondisi sampai dengan Akhir bulan Juni 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM. KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGORI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGAN / TOTAL APBD (%)	REALISAS I FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=8/6	11	12
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	19	136	364.637.765.354	357.501.121.592	87.753.567.754	24,55	24,07	24,07	SR
2	DINAS KESEHATAN			746	180.260.441.820	155.212.881.614	43.112.899.759	27,78	23,92	23,92	SR
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			16	43.332.245.750		9.485.076.147	0,00	21,89	21,89	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18	63	75.662.641.357	7.218.082.453.65 7	2.372.726.730	0,03	3,14	3,14	SR
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7	17	38	10.774.539.802	2.221.970.752	712.117.742	32,05	6,61	6,61	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	11	34	6.854.875.187	6.699.351.397	3.865.576.001	57,70	56,39	56,39	R
7	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA ALAM DAN DAERAH	2	11	40	4.100.524.823	4.100.524.823	811.574.650	19,79	19,79	19,79	SR

8	DINAS SOSIAL	7	16	71	3.012.442.590	2.850.502.293	1.202.651.831	42,19	39,92	39,92	SR
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	22	57	1.883.316.257	1.759.339.146	632.734.023	35,96	33,60	33,60	SR
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	15	42	2.684.253.637	2.613.963.987	1.396.222.184	53,41	52,02	52,02	R
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	20	60	5.359.761.788	4.648.258.887	1.990.472.888	42,82	37,14	37,14	SR
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5	20	87	3.369.194.081	3.262.575.145	2.155.196.543	66,06	63,97	63,97	S
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	12	78	2.640.723.457	2.622.212.357	1.416.983.689	54,04	53,66	53,66	R
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	15	57	13.762.937.134	8.035.717.434	2.523.453.577	31,40	18,34	18,34	SR
15	DINAS PERHUBUNGAN	3	18	77	7.218.137.033	6.557.164.585	3.083.206.110	47,02	42,71	42,71	SR
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	13	58	2.034.121.518	1.999.518.418	938.806.500	46,95	46,15	46,15	SR
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	16	61	4.862.990.788	4.765.701.988	1.467.150.125	30,79	30,17	30,17	SR

18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN IJIN TERPADU SATU PINTU	6	14	64	3.045.213.228	2.838.235.478	676.632.966	23,84	22,22	22,22	SR
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	15	51	2.567.413.705	2.103.556.123	844.371.576	40,14	32,89	32,89	SR
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	13	61	3.331.754.819	2.046.370.095	1.248.559.785	61,01	37,47	37,47	R
21	DINAS PERIKANAN	5	18	66	5.390.960.761	5.245.457.622	3.326.503.470	63,42	61,71	61,71	R
22	DINAS PARIWISATA	4	15	30	4.204.237.491	3.834.783.691	1.280.520.669	33,39	30,46	30,46	SR
23	DINAS PERTANIAN	6	19	60	29.643.810.333	26.688.951.448	8.839.186.216	33,12	29,82	29,82	SR
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8	19	47	4.894.479.525	4.836.898.122	2.127.606.286	43,99	43,47	43,47	SR
25	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	8	19	68	5.640.402.601	5.415.498.611	1.268.080.588	23,42	22,48	22,48	SR
26	SEKRETARIAT DAERAH	16	62	214	16.262.440.969	12.591.137.016	7.326.777.286	58,19	45,05	45,05	R
27	SEKRETARIAT DPRD	2	15	66	28.810.753.726	20.374.477.381	8.215.558.486	40,32	28,52	28,52	SR
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	4	17	91	6.568.211.323	5.833.997.652	2.583.446.401	44,28	39,33	39,33	SR

	DAERAH										
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	13	90	309.776.855.916	312.361.693.510	1.732.896.233	0,55	0,56	0,56	SR
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4	8	30	4.677.755.988	3.498.071.969	956.606.966	27,35	20,45	20,45	SR
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	3	14	96	5.042.694.626	4.905.552.966	1.802.215.390	36,74	35,74	35,74	SR
32	INSPEKTORAT DAERAH	3	12	69	4.087.585.050	3.589.695.554	1.882.340.474	52,44	46,05	46,05	R
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	6	13	69	54.680.784.647	53.995.055.669	22.351.054.772	41,39	40,88	40,88	SR
34	KECAMATAN ENDE	6	17	85	1.641.155.123	1.593.641.209	592.392.274	37,17	36,10	36,10	SR
35	KECAMATAN ENDE TENGAH	25	71	193	4.271.432.945	3.750.651.759	1.929.465.941	51,44	45,17	45,17	R
36	KECAMATAN ENDE SELATAN	29	90	243	4.929.484.005	4.307.818.088	1.736.418.386	40,31	35,23	35,23	SR
37	KECAMATAN ENDE TIMUR	14	45	139	3.573.118.157	2.988.253.123	1.114.462.123	37,29	31,19	31,19	SR
38	KECAMATAN ENDE UTARA	18	51	162	4.456.700.605	3.914.035.270	2.028.070.404	51,82	45,51	45,51	R
39	KECAMATAN PULAU ENDE	6	17	71	1.272.348.336	1.186.677.636	458.610.425	38,65	36,04	36,04	SR

40	KECAMATAN NANGAPANDA	11	30	104	2.426.596.773	2.298.099.533	850.870.714	37,02	35,06	35,06	SR
41	KECAMATAN NDONA	14	51	142	2.817.932.085	2.631.416.160	1.239.595.331	47,11	43,99	43,99	SR
42	KECAMATAN DETUSOKO	10	29	95	2.185.320.100	2.075.014.636	810.002.198	39,04	37,07	37,07	SR
43	KECAMATAN KELIMUTU	6	16	53	1.098.092.692	1.036.045.377	670.938.529	64,76	61,10	61,10	R
44	KECAMATAN DETUKELI	6	18	72	1.532.977.995	1.486.128.906	190.877.666	12,84	12,45	12,45	SR
45	KECAMATAN WOLOWARU	9	27	74	2.093.823.751	1.876.072.014	1.066.385.463	56,84	50,93	50,93	R
46	KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE	6	19	89	976.437.280	964.137.280	254.384.258	26,38	26,05	26,05	ST
47	KECAMATAN MAUROLE	6	17	68	1.270.840.452	1.222.230.852	588.654.689	48,16	46,32	46,32	SR
48	KECAMATAN LIO TIMUR	9	25	94	1.840.496.794	1.649.584.700	547.103.103	33,17	29,73	29,73	SR
49	KECAMATAN KOTABARU	6	17	68	1.213.635.959	1.174.332.093	436.710.760	37,19	35,98	35,98	SR
50	KECAMATAN MAUKARO	6	17	60	1.419.536.526	1.388.074.326	592.556.980	42,69	41,74	41,74	SR
51	KECAMATAN WOLOJITA	7	12	28	1.760.185.433	1.647.437.891	296.260.707	17,98	16,83	16,83	SR
52	KECAMATAN WEWARIA	6	16	48	1.296.691.467	1.269.831.167	588.330.290	46,33	45,37	45,37	SR
53	KECAMATAN NDONA TIMUR	6	15	41	855.718.861	810.985.716	0	0,00	0,00	0,00	SR
54	KECAMATAN NDORI	6	17	54	729.885.433	710.792.433	268.431.796	37,77	36,78	36,78	SR

	TOTAL	380	1.14 6	4.876	1.264.738.677.85 6	8.293.073.951.15 1	247.643.295.85 4	2,99	19,58	19,58	SR
--	--------------	------------	-------------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------	--------------	-----------

- Keterangan :
- ☐ Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (PD) yang disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Ende dan data dari BPKAD;
 - ☐ Realisasi berdasarkan Anggaran Kas, dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Kas PD (dana yang direncanakan untuk belanja program dan kegiatan) sampai dengan semester I.

Tabel 2.4. Realisasi Belanja per masing-masing Misi Pembangunan kondisi sampai dengan Akhir bulan Juni 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM . KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGO RI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGA N / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGA N/ TOTAL APBD (%)	REALISA SI FISIK (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	MISI 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	13	47	248	370.536.933.878	361.651.047.810	89.846.499.115	24,84	24,25	24,25	SANGAT RENDAH
	1) DINAS PK	6	19	136	364.637.765.354	357.501.121.592	87.753.567.754	24,55	24,07	24,07	SR
	2) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	13	61	3.331.754.819	2.046.370.095	1.248.559.785	61,01	37,47	37,47	R
	3) DISPORA	4	15	51	2.567.413.705	2.103.556.123	844.371.576	40,14	32,89	32,89	SR
2.	Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	4	15	819	237.355.624.704	163.248.599.048	55.121.429.483	33,77	23,22	23,22	SANGAT RENDAH
	1) DINAS KESEHATAN	0	-	746	180.260.441.820	155.212.881.614	43.112.899.759	27,78	23,92	23,92	SR

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGO RI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGA N / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGA N/ TOTAL APBD (%)	REALISA SI FISIK (%)	
	2) RSUD	0	-	16	43.332.245.750	-	9.485.076.147	#DIV/0!	21,89	21,89	SR
	3) DPP dan KB	4	15	57	13.762.937.134	8.035.717.434	2.523.453.577	31,40	18,34	18,34	SR
3.	Misi 3: Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan	50	135	438	60.366.348.364	56.239.490.947	20.381.902.504	36,24	33,76	33,76	SANGAT RENDAH
	1) DINAS TRANSAKER	8	19	68	5.640.402.601	5.415.498.611	1.268.080.588	23,42	22,48	22,48	SR
	2) DINKOP, UKM	8	16	61	4.862.990.788	4.765.701.988	1.467.150.125	30,79	30,17	30,17	SR
	3) DPM, PPTSP	6	14	64	3.045.213.228	2.838.235.478	676.632.966	23,84	22,22	22,22	SR
	4) DINAS KETAHANAN PANGAN	5	15	42	2.684.253.637	2.613.963.987	1.396.222.184	53,41	52,02	52,02	R
	5) DINAS PERTANIAN	6	19	60	29.643.810.333	26.688.951.448	8.839.186.216	33,12	29,82	29,82	SR
	6) DINAS PARIWISATA	4	15	30	4.204.237.491	3.834.783.691	1.280.520.669	33,39	30,46	30,46	SR
	7) DINAS PERIKANAN	5	18	66	5.390.960.761	5.245.457.622	3.326.503.470	63,42	61,71	61,71	R
	8) DISPERDAGI N	8	19	47	4.894.479.525	4.836.898.122	2.127.606.286	43,99	43,47	43,47	SR

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM . KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGO RI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGA N / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGA N/ TOTAL APBD (%)	REALISA SI FISIK (%)	
4.	Misi 4: Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif maupun Kualitatif Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan	26	73	238	99.015.079.980	7.231.509.847.881	8.158.523.470	0,11	8,24	8,24	SANGAT RENDAH
	1) DINAS PUPR	7	18	63	75.662.641.357	7.218.082.453.657	2.372.726.730	0,03	3,14	3,14	SR
	2) DISPERA, KPP	7	17	38	10.774.539.802	2.221.970.752	712.117.742	32,05	6,61	6,61	SR
	3) DINAS PERHUBUNGAN	3	18	77	7.218.137.033	6.557.164.585	3.083.206.110	47,02	42,71	42,71	R
	4) DLH	9	20	60	5.359.761.788	4.648.258.887	1.990.472.888	42,82	37,14	37,14	SR
5.	Misi 5:	287						15,43	14,90	14,90	SANGAT

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM . KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGO RI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGA N / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGA N/ TOTAL APBD (%)	REALISA SI FISIK (%)	
	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat		876	3.133	497.464.690.930	480.424.965.465	74.134.941.282				RENDAH
	1) BAPPEDA	4	17	91	6.568.211.323	5.833.997.652	2.583.446.401	44,28	39,33	39,33	SR
	2) BPKAD	3	13	90	309.776.855.916	312.361.693.510	1.732.896.233	0,55	0,56	0,56	SR
	3) BAPENDA	4	8	30	4.677.755.988	3.498.071.969	956.606.966	27,35	20,45	20,45	SR
	4) INSPEKTORA T	3	12	69	4.087.585.050	3.589.695.554	1.882.340.474	52,44	46,05	46,05	R
	5) SEKRETARIA T DAERAH	16	62	214	16.262.440.969	12.591.137.016	7.326.777.286	58,19	45,05	45,05	R
	6) SEKRETARIA T DPRD	2	15	66	28.810.753.726	20.374.477.381	8.215.558.486	40,32	28,52	28,52	SR
	7) BKPSDM	3	14	96	5.042.694.626	4.905.552.966	1.802.215.390	36,74	35,74	35,74	SR
	8) DISPENDUK DAN CAPIL	5	20	87	3.369.194.081	3.262.575.145	2.155.196.543	66,06	63,97	63,97	S
	9) DINAS KOMINFO	5	13	58	2.034.121.518	1.999.518.418	938.806.500	46,95	46,15	46,15	SR

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM . KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGO RI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGA N / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGA N/ TOTAL APBD (%)	REALISA SI FISIK (%)	
	10) DINSOS	7	16	71	3.012.442.590	2.850.502.293	1.202.651.831	42,19	39,92	39,92	SR
	11) DINAS PPPA	7	22	57	1.883.316.257	1.759.339.146	632.734.023	35,96	33,60	33,60	SR
	12) DPMD	5	12	78	2.640.723.457	2.622.212.357	1.416.983.689	54,04	53,66	53,66	R
	13) BPBD	2	11	40	4.100.524.823	4.100.524.823	811.574.650	19,79	19,79	19,79	SR
	14) BADAN KESBANGPOL	6	13	69	54.680.784.647	53.995.055.669	22.351.054.772	41,39	40,88	40,88	SR
	15) SATPOL PP	3	11	34	6.854.875.187	6.699.351.397	3.865.576.001	57,70	56,39	56,39	R
	16) KECAMATAN ENDE	6	17	85	1.641.155.123	1.593.641.209	592.392.274	37,17	36,10	36,10	SR
	17) KEC. ENDE TENGAH	25	71	193	4.271.432.945	3.750.651.759	1.929.465.941	51,44	45,17	45,17	R
	18) KEC. ENDE SELATAN	29	90	243	4.929.484.005	4.307.818.088	1.736.418.386	40,31	35,23	35,23	SR
	19) KEC. ENDE TIMUR	14	45	139	3.573.118.157	2.988.253.123	1.114.462.123	37,29	31,19	31,19	SR
	20) KEC. ENDE UTARA	18	51	162	4.456.700.605	3.914.035.270	2.028.070.404	51,82	45,51	45,51	R
	21) KEC. PULAU ENDE	6	17	71	1.272.348.336	1.186.677.636	458.610.425	38,65	36,04	36,04	SR
	22) KEC. NANGAPANDA	11	30	104	2.426.596.773	2.298.099.533	850.870.714	37,02	35,06	35,06	SR
	23) KECAMATAN NDONA	14	51	142	2.817.932.085	2.631.416.160	1.239.595.331	47,11	43,99	43,99	SR

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM · KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGO RI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGA N / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGA N/ TOTAL APBD (%)	REALISA SI FISIK (%)	
	24) KECAMATAN DETUSOKO	10	29	95	2.185.320.100	2.075.014.636	810.002.198	39,04	37,07	37,07	SR
	25) KECAMATAN KELIMUTU	6	16	53	1.098.092.692	1.036.045.377	670.938.529	64,76	61,10	61,10	R
	26) KECAMATAN DETUKELI	6	18	72	1.532.977.995	1.486.128.906	190.877.666	12,84	12,45	12,45	SR
	27) KEC. WOLOWARU	9	27	74	2.093.823.751	1.876.072.014	1.066.385.463	56,84	50,93	50,93	R
	28) KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE	6	19	89	976.437.280	964.137.280	254.384.258	26,38	26,05	26,05	ST
	29) KECAMATAN MAUROLE	6	17	68	1.270.840.452	1.222.230.852	588.654.689	48,16	46,32	46,32	SR
	30) KECAMATAN LIO TIMUR	9	25	94	1.840.496.794	1.649.584.700	547.103.103	33,17	29,73	29,73	SR
	31) KECAMATAN KOTABARU	6	17	68	1.213.635.959	1.174.332.093	436.710.760	37,19	35,98	35,98	SR
	32) KECAMATAN MAUKARO	6	17	60	1.419.536.526	1.388.074.326	592.556.980	42,69	41,74	41,74	SR
	33) KECAMATAN WOLOJITA	7	12	28	1.760.185.433	1.647.437.891	296.260.707	17,98	16,83	16,83	SR
	34) KECAMATAN WEWARIA	6	16	48	1.296.691.467	1.269.831.167	588.330.290	46,33	45,37	45,37	SR
	35) KEC.NDONA TIMUR	6	15	41	855.718.861	810.985.716	-	0,00	0,00	0,00	SR
	36) KECAMATAN NDORI	6	17	54	729.885.433	710.792.433	268.431.796	37,77	36,78	36,78	SR
	TOTAL ANGGARAN	380	1.14	4.876	1.264.738.677.85	8.293.073.951.15	247.643.295.85	2,99	19,58	19,58	SR

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DAERAH	JUM. PRO G	JUM · KEG	JUM. SUB KEGIATA N	JUML. TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d SEMESTER I					KATEGO RI (dibandin g Anggaran Kas PD)
						ANGGARAN KAS SEMESTER I (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGA N / ANGGARA N KAS (%)	REALISASI KEUANGA N/ TOTAL APBD (%)	REALISA SI FISIK (%)	
	BELANJA TAHUN 2024		6		6	1	4				

Sumber Data: Hasil Analisis Bappeda Kab. Ende

4. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1) Evaluasi SPM Bidang Pendidikan

Gambar 2.1 Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan kondisi Tahun 2023



an Dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 72,50 persen, Pendidikan Dasar sebesar 94,63 persen, dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 0,93 persen.

Tabel 2.5 Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kondisi Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT			PARTISIPASI PESERTA DIDIK			HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PEN DIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini	272	890		8.597			6.233			72,50 %
2	Pendidikan Dasar	423	5.068			47.987			45.411		94,63 %
3	Pendidikan Kesetaraan	8	50				66.074			617	0,93%

Catatan:
Dari Indeks Pencapaian SPM yang diperoleh dalam bidang urusan Pendidikan dengan jenis pelayanan dasar PAUD sebesar 72,50%, Pendidikan Dasar sebesar 94,63% dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 0,93%

2) Evaluasi SPM Bidang Kesehatan

Gambar 2.2 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan kondisi Tahun 2023



Capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan kondisi sampai dengan tahun 2023: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 59,48 persen, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 76,61 persen, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 74,20 persen , Pelayanan kesehatan balita sebesar 74,39 persen , Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 64,92 persen, Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 84,28 persen, Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut sebesar 60,10 persen, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 94,28 persen, Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sebesar 95,62 persen, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 97,14 persen, Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis sebesar 100 persen, Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sebesar 100 persen.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Kondisi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			81.67 %
1.	<i>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>					59.48 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	44.81 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5283	2959	2,324	56.01 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.67 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	73.34 %
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	5283	2959	2324	56.01 %
	2. Tablet tambah darah	Tablet	5283	2959	2324	56.01 %
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	1	1	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	1	1	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	1	1	0	100.00 %
	6.Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	1	1	0	100.00 %
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	5283	2959	2324	56.01 %
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5283	2959	2324	56.01 %
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	1	1	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	366	366	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	488	0	488	0%
	12.Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada	Orang	5283	2959	2324	56.01 %

	trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)					
	JUMLAH	27,274	15,166	12,108	880.05 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					76.61 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.41 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5043	3682	1,361	73.01 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.20 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	91.00 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	5043	3682	1361	73.01 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	1	1	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5043	3682	1361	73.01 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	366	366	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	488	488	0	100.00 %
	JUMLAH	10,942	8,22	2,722	546.02 %	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					74.20 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	57.95 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4803	3479	1,324	72.43 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.25 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	81.24 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	4803	3479	1324	72.43 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	4803	3479	1324	72.43 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4803	3479	1324	72.43 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	4803	3479	1324	72.43 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi	Orang	4803	3479	1324	72.43 %

	Muda (MTBM)					
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5043	3479	1564	68.99 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	1	1	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	366	366	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	488	488	0	100.00 %
	JUMLAH	29,913	21,729	8,184	731.14 %	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					74.37 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	61.87 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	26520	20509	6,011	77.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.50 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	62.52 %
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	5	5	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	26520	20509	6011	77.33 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5283	5283	0	100.00 %
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	0	0	0	0%
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	0	0	0	0%
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	4789	2540	2249	53.04 %
	7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	4789	2866	1923	59.85 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	4789	3448	1341	72.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	4789	3859	930	80.58 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	4789	3619	1170	75.57 %
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	4789	3843	946	80.25 %
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	4789	3843	946	80.25 %
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin	4789	3772	1017	78.76 %

	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	4789	3843	946	80.25 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	4789	0	4789	0%
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	1	0	1	0%
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	1	0	1	0%
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	57	57	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	236	236	0	100.00 %
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	447	447	0	100.00 %
	21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %
	22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	130	130	0	100.00 %
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	80,618	58,348	22,27	1,437.88 %	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					64.92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	51.24 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	30867	19772	11,095	64.06 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.67 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	68.36 %
	1. Buku raport kesehatanku	Buku	30867	19772	11095	64.06 %
	2. Buku pemantauan kesehatan	Buku	30867	19772	11095	64.06 %
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	30867	19772	11095	64.06 %
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	30867	19772	11095	64.06 %
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	30867	19772	11095	64.06 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	8	8	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	236	236	0	100.00 %

	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	449	449	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	53	53	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	0	0	0	0%
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	155,129	99,654	55,475	820.30 %	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					84.28 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.14 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	185477	160300	25,177	86.43 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.13 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	75.67 %
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	185477	160300	25177	86.43 %
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	1170	1170	0	100.00 %
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	26	26	0	100.00 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	26	26	0	100.00 %
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	26	26	0	100.00 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	26	26	0	100.00 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	26	26	0	100.00 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	1	1	0	100.00 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	1	0	1	0%
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	1	0	1	0%
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	0	0	0	0%
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	57	57	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	236	236	0	100.00 %

	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	449	449	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	31	31	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	187,596	162,417	25,179	1,286.43 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					60.10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	45.22 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	30451	17212	13,239	56.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.88 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	74.40 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	30451	17212	13239	56.52 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	30451	17212	13239	56.52 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	30451	17212	13239	56.52 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	57	57	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	236	236	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	449	449	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	92,186	52,469	39,717	669.56 %	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita					94.28 %

	Hipertensi					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.45 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	68842	64070	4,772	93.07 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						19.83 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	99.13 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	1	1	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	Unit	130	130	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	57	57	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	236	236	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	449	449	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	68842	64070	4772	93.07 %
	JUMLAH	69,759	64,987	4,772	793.07 %	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					95.62 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.29 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2771	2677	94	96.61 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						18.33 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	91.67 %
	1. Alat : Glukometer	Unit	1	1	0	100.00 %
	2. Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	1	1	0	100.00 %
	3. Alat : Kapas Alkohol	Unit	1	1	0	100.00 %

	4. Alat : Lancet	Unit	1	1	0	100.00 %
	5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	1	1	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	57	57	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	236	236	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	449	449	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	48	48	0	100.00 %
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	0	100.00 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	0	0	0	0%
	JUMLAH	839	839	0	1,100.00 %	
10.	<i>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</i>					97.14 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	965	965	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.14 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	85.71 %
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	965	965	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	965	965	0	100.00 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	2	2	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	57	57	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	366	366	0	100.00 %

	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	2,356	2,356	0	600.00 %	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					99.03 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5540	6555	-1,015	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.03 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	95.13 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	29	29	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Paket	5540	6555	-1015	118.32 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	1	1	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5540	6555	-1015	118.32 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	1	1	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	449	449	0	100.00 %
	10.Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	69	69	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	12	12	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	53	53	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	11,699	13,729	-2,03	1,236.64 %	

12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	6635	6950	-315	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	100.00 %
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	2	2	0	100.00 %
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	1	1	0	100.00 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1	1	-1	inf %
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	1	1	0	100.00 %
	5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	0	0	0	0%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	449	449	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	366	366	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	69	69	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	53	53	0	100.00 %
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	941	942	-1	700.00 %	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Ende tahun 2023(e-spm).

Dari data di atas menggambarkan bahwa jenis pelayanan dasar urusan kesehatan dari 12 (dua belas) jenis indikator layanan dasar indikator pencapaian pada tahun 2023 adalah sebesar : **81,67%** atau **kategori Tuntas Madya**.

Namun Jenis Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (59,48 %), Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60,10%) dan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (64,92%), yang perlu menjadi perhatian untuk bisa ditingkatkan.

3) Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambar 2.3 Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi Tahun 2023



Capaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi sampai dengan tahun 2023: Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sebesar 66,60 persen, dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik sebesar 43,51 persen.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			55.05 %
1.	<i>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</i>					66.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	52.53 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	276.740	181.705	95.035	65.66 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.07 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	70.36 %
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	64.117	36.341	27.776	56.68 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	64.117	36.341	27.776	56.68 %

	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	27.776	20.283	7.493	73.02 %
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	8.269	7.862	407	95.08 %
	JUMLAH	164	101	63	281.46 %	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					43.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	28.39 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	276.740	98.215	178.525	35.49 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.12 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	75.59 %

1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	5.835	5.827	8	99.86 %
2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	49.521	17.592	31.929	35.52 %
3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	31.929	25.470	6.459	79.77 %
4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	6.459	5.827	632	90.22 %

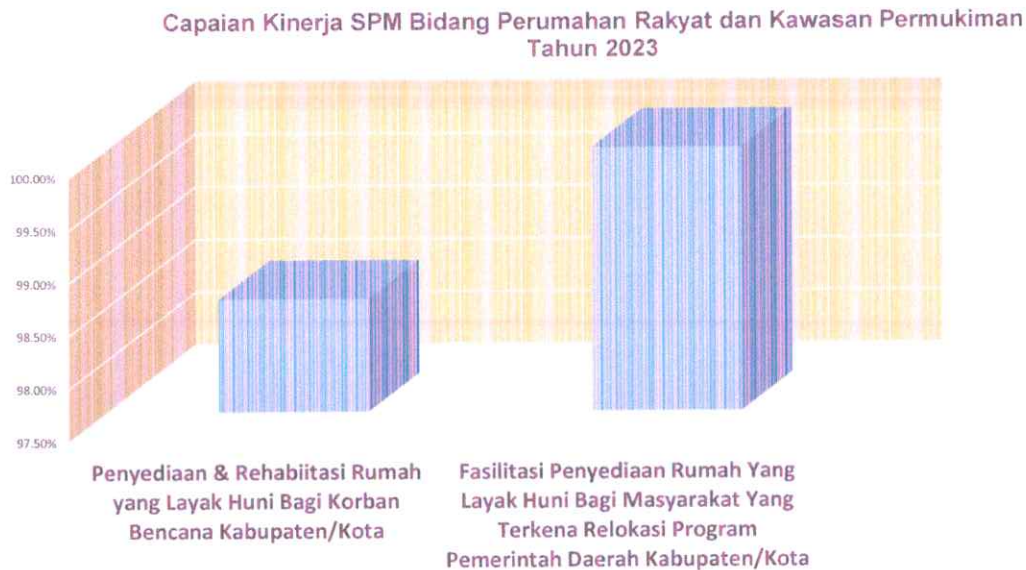
5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	16.070	11.662	4.408	72.57 %
JUMLAH	110	66	43	377.94 %	

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Ende tahun 2023 (e-SPM).

Catatan: Dari tabel di atas menggambarkan bahwa dari 2 (dua) jenis indikator jenis pelayanan dasar indikator pencapaian yakni **belum tuntas** atau **55,05 %**

4) Evaluasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2.4 Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kondisi Tahun 2023



Capaian kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kondisi sampai dengan tahun 2023: berdasarkan hasil penghitungan Total Indeks Pencapaian SPM dan Kategori Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman sebesar **99.29 %** atau **Tuntas Utama**

Tabel 2.8 Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kondisi Tahun 2023

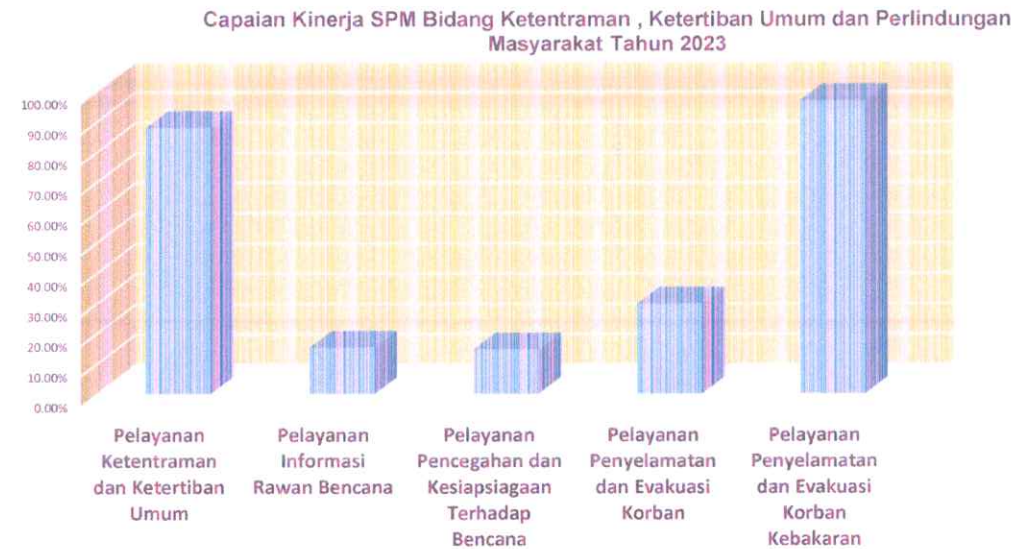
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.29 %	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					98.57 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		10	1	9	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.57 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.86 %	
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0.00 % 0	
	JUMLAH	0	0	0	1,300.00 %		

2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.00 %	
	1.Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00 % 0	
	2. Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0.00 % 0	
	3. Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	0.00 % 0	
	JUMLAH	0	0	0	0.00 %		

Sumber data : Dinas PRKP2 Kabupaten Ende, 2023 (e-spm).

5) Evaluasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Gambar 2.4 Capaian Kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023



Capaian kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kondisi sampai dengan tahun 2023: Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 87,94 persen, Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar 15,29 persen, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 14,68 persen, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban sebesar 29,92 persen, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 96,78 persen.

Tabel 2.9 Capaian Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas kondisi Tahun 2023

TOTAL CAPAIAN SPM TRANTIBUM LINMAS					68,23 %	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS MADYA			87.94 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					87.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		279	86,867	-86.588.183	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				7.94 %
			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	39.72 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	800	500	300	62.50 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	20	8	12	40.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	110	62	48	56.36 %

	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	0	1	0%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2			-3		-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			BELUM TUNTAS			19.96 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					15.29 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0.21 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		277,589	743	276,846	0.27 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			15.08 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.39 %

	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	277,589	277,589	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	277,589	4,279	273310	1.54 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	10	10	0	100.00 %
2 .	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</i>					14.68 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	1.42 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		277,635	4,915	272,720	1.77 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			13.27 %
			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	66.33 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	46	46	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	277,589	90,632	186957	32.65 %
3 .	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</i>					29.92 %
	ya	Ya Terjadi Bencana				

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	9.92 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		277,606	34,432	243,174	12.40 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2	2	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	34,415	34,415	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	10	10	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	2	2	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	3	3	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2			-3		-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			96.78 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

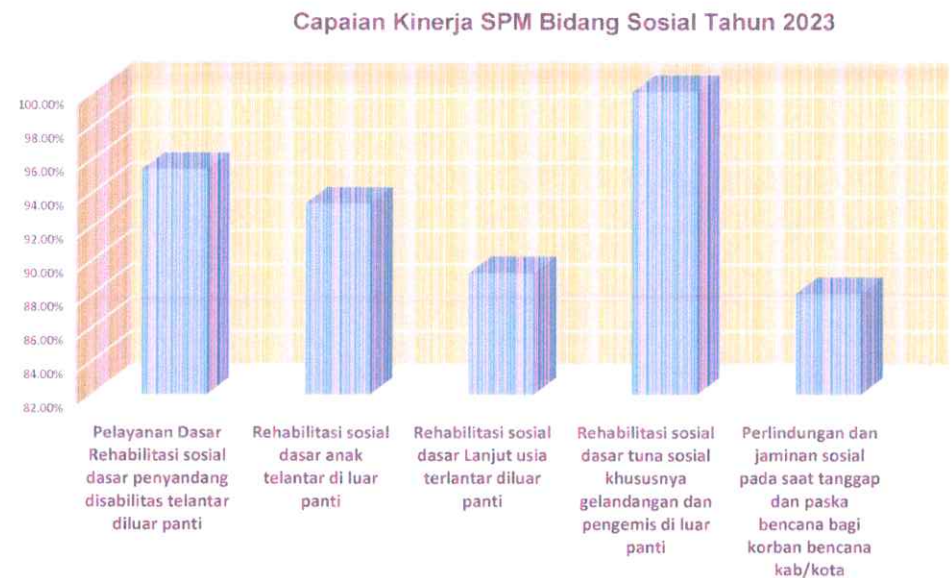
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		86,867	86,867	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR(20%)				16.78 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	83.91 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	13	13	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	13	13	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	50	20	30	40.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	46	44	2	95.65 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	13	13	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	0	0%

Sumber data : Satpol PP dan Linmas (e-spm) 2023.

Dari data di atas Indeks Pencapaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Total adalah **87,94 %** atau kategori **Tuntas Madya**

6) Evaluasi SPM Bidang Sosial

Gambar 2.5 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial kondisi Tahun 2023



Capaian kinerja SPM Bidang Sosial kondisi sampai dengan tahun 2023: Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sebesar 95,38 persen, Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sebesar 93,33 persen, Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlanter diluar panti sebesar 89,23 persen, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 100 persen disebabkan tidak ada gelandang dan pengemis yang dutangani, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota sebesar 88 persen.

Tabel 2.10 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial kondisi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			93.19 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					95.38 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		122	122	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.38 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	76.92 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	19	19	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	25	25	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	16	16	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2	2	0	100.00 %	

2 .	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	5	5	0	100.00 %		
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %		
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0	0	0	0.00 %		
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %		
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %		
	13 . Layanan rujukan	Orang	2	2	0	100.00 %		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti						93.33 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		85	85	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66.67 %		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0	0.00 %		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	14	14	0	100.00 %		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0	0.00 %		

3 .	4 . Penyediaan sandang	Orang	13	13	0	100.00 %	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	14	14	0	100.00 %	
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	11	11	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	14	14	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	14	14	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					89.23 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		115	115	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					9.23 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	46.15 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100.00 %	

4 .	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0	0.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	21	21	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	21	21	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	2	2	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	21	21	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100%	

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0	0.00 %	
2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0	0.00 %	
3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0	0.00 %	
4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %	
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00 %	
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	0	0	0	0.00 %	
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	0	0	0.00 %	
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00 %	
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0	0	0	0.00 %	
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	0.00 %	
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0.00 %	
12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0	0.00 %	

5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					88.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		383	383	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	40.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	367	367	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	16	16	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0	0.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0	0.00 %	

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Ende tahun 2023 (e-spm).

Dari data di atas menggambarkan bahwa realisasi pencapaian SPM Urusan Sosial adalah **93,19 %** atau **Kategori Tuntas Utama**,

5. EVALUASI KINERJA RPJMD KABUPATEN ENDE

Mengacu pada target makro yang ditetapkan dalam dokumen awal RPJMD 2019-2024, Mengacu pada target makro yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 dan kondisi capaian kinerja sampai Tahun 2023, dirumuskan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.11. Target Makro Perubahan RPJMD 2019-2024 dan Capaian sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2019	Capaian Kinerja				Target 2024
			2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	67,20	67,04	67,04	67,30	67,97	68,63
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08	- 1,33	-1,33	2,13	3,09	3,87
3	Angka Kemiskinan (%)	23,18 (63,450 jiwa)	23,76 (65.220 jiwa)	23,76 (65.220 jiwa)	24,13 (66.380 jiwa)	23,00 (63.400 jiwa)	22,86 (63.100 jiwa)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,98	2,95	2,95	2,61	2,06	2,59
5	Gini Ratio (Angka)	0,304	0,341	0,341	0,298	0,306	0,273
6	Laju Inflasi (%)	5	4,98	4,98	4,98	4,96	3,27%
7	Nilai Investasi (Trilyun)	1	3,1	3,1	0,6	4,12	-
8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	C	-	C	C	CC
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.44	-	95.64	95.81	95,64	88.81
10	Ratio PAD (%)	6,29	9,86	9,86	7,72	6,38	
11	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	22,29	22,13	22,44	23,21	24,83	26,47
12	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (TonCO2)	-	-	-	-	17.248.829	34,09c)
13	Prevalensi Stunting (%)	14,30	17,40	17,40	14,30	8,90	6,80

Sumber Data: Hasil Evaluasi Bappeda Kab. Ende

6. EVALUASI CAPAIAN KINERJA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Visi Pembangunan Kabupaten Ende kondisi sampai dengan tahun 2023 sebesar 79,35 persen atau dalam kategori TINGGI, sementara untuk 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Ende kondisi sampai dengan tahun 2023:

- **Misi 1** sebesar **73 persen** atau dalam kategori **SEDANG**;
- **Misi 2** sebesar **80,38 persen** atau dalam kategori **TINGGI**;
- **Misi 3** sebesar **79,78 persen** atau dalam kategori **TINGGI**;
- **Misi 4** sebesar **77,28 persen** atau dalam kategori **TINGGI**; dan
- **Misi 5** sebesar **86,33 persen** atau dalam kategori **TINGGI**.

Rincian dari capaian kinerja Visi dan masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ende, dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini:

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2019-2024
(kondisi s/d tahun 2023)

Uraian		Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
Visi	MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	79,35%	Tinggi	Capaian Kinerja 273 Indikator Kinerja yang ditetapkan, kondisi sampai dengan tahun 2023
Misi 1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	73,00%	Sedang	MISI 1 : 32 Indikator Kinerja • 3 Indikator Melampaui Target • 8 Indikator Mencapai Target • 18 Indikator Belum Mencapai Target • 3 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	80,38%	Tinggi	MISI 2 : 64 Indikator Kinerja • 22 Indikator Melampaui Target • 12 Indikator Mencapai Target • 22 Indikator Belum Mencapai Target • 8 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 3	Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan	79,78%	Tinggi	MISI 3 : 82 Indikator Kinerja • 31 Indikator Melampaui Target • 12 Indikator Mencapai Target • 25 Indikator Belum Mencapai Target • 14 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 4	Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan	77,28%	Tinggi	MISI 4 : 24 Indikator Kinerja • 9 Indikator Melampaui Target • 2 Indikator Mencapai Target • 7 Indikator Belum Mencapai Target • 6 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 5	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat	86,33%	Tinggi	MISI 5 : 71 Indikator Kinerja • 11 Indikator Melampaui Target • 36 Indikator Mencapai Target • 18 Indikator Belum Mencapai Target • 6 Indikator Masih Jauh Dibawah Target

Sumber Data: Hasil Evaluasi Bappeda Kab. Ende

7. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.13. Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 menurut Perangkat Daerah kondisi sampai dengan Tahun 2023

VISI / MISI / SKPD			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2019-2024										
			Jumlah				Jumlah Indikator Kinerja	Masih Jauh dibawah target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Kriteria
			Program		Kegiatan								
			Rutin	Urusan	Rutin	Urusan							
“Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masyarakat yang Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan”			54	182	613	396	273	37	90	70	76	79,35%	TINGGI
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi		3	7	15	15	32	3	18	8	3	73,00%	SEDANG
	1)	DINAS P & K	1	3	5	8	27	2	16	8	1	73,73%	SEDANG
	2)	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	1	1	5	2	1	0	1	0	0	39,33%	SANGAT RENDAH
	3)	DISPORA	1	3	5	5	4	1	1	0	2	76,49%	TINGGI
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		3	9	12	19	64	8	22	12	22	80,38%	TINGGI
	1)	DINKES	1	4	6	9	52	7	17	11	17	84,26%	TINGGI
	2)	RSUD	1	2	1	4	8	1	4	0	3	59,12%	RENDAH
	3)	DPPKB	1	3	5	6	4	0	1	1	2	72,42%	SEDANG
3	Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan		9	41	54	50	82	14	25	12	31	79,78%	TINGGI
	1)	DISPAR	1	3	4	3	4	0	1	0	3	91,75%	SANGAT TINGGI
	2)	BAPENDA	1	1	4	1	1	0	1	0	0	86,69%	TINGGI

VISI / MISI / SKPD			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2019-2024										
			Jumlah				Jumlah Indikator Kinerja	Masih Jauh dibawah target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Kriteria
			Program		Kegiatan								
			Rutin	Urusan	Rutin	Urusan							
	3)	DINKOP & UKM	1	6	6	6	7	1	1	2	3	84,87%	TINGGI
	4)	DISPERDAGIN	1	7	7	8	9	2	3	1	3	77,04%	TINGGI
	5)	DPMPTSP	1	5	8	6	6	2	1	1	2	77,72%	TINGGI
	6)	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	4	6	6	4	1	1	0	2	73,98%	SEDANG
	7)	DINAS PERIKANAN	1	4	6	6	2	0	2	0	0	99,96%	SANGAT TINGGI
	8)	DINAS PERTANIAN	1	5	6	7	41	7	13	4	17	76,75%	TINGGI
	9)	DISTRANSNAKER	1	6	7	7	8	1	2	4	1	86,48%	TINGGI
4	Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan		4	20	26	26	24	6	7	2	9	77,28%	TINGGI
	1)	Dinas PUPR	1	7	5	9	8	1	5	0	2	91,97%	SANGAT TINGGI
	2)	DISHUB	1	2	7	4	2	1	0	1	0	65,17%	RENDAH
	3)	DLH	1	7	7	8	9	3	0	1	5	73,18%	SEDANG
	4)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT	1	4	7	5	5	1	2	0	2	65,99%	SEDANG
5	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat		35	105	506	286	71	6	18	36	11	86,33%	TINGGI
	1)	DINAS/BADAN	0	0	0	0	1	0	0	1	0	100,00%	SANGAT TINGGI

VISI / MISI / SKPD			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2019-2024										
			Jumlah				Jumlah Indikator Kinerja	Masih Jauh dibawah target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Kriteria
			Program		Kegiatan								
			Rutin	Urusan	Rutin	Urusan							
	2)	KECAMATAN	21	63	420	210	7	0	0	7	0	100,00%	SANGAT TINGGI
	3)	DISPENDUK & CAPIL	1	4	4	8	6	0	1	0	5	96,89%	SANGAT TINGGI
	4)	DISKOMINFO	1	4	5	5	5	2	1	1	1	66,21%	SEDANG
	5)	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	0	1	0	2	1	0	1	0	0	73,59%	SEDANG
	6)	BAPPEDA	1	3	7	7	3	1	2	0	0	64,47%	RENDAH
	7)	SEKRETARIAT DPRD	1	1	7	6	3	0	2	1	0	79,86%	TINGGI
	8)	SETDA	1	2	12	8	8	0	3	5	0	94,57%	SANGAT TINGGI
	9)	BPKAD	1	2	7	5	3	0	0	3	0	0,00%	SANGAT RENDAH
	10)	INSPEKTORAT DAERAH	1	2	6	3	2	0	1	0	1	79,38%	TINGGI
	11)	BKPSDM	1	2	6	5	2	0	1	0	1	91,44%	SANGAT TINGGI
	12)	Badan Kesbangpolda	1	4	5	4	5	0	3	1	1	85,33%	TINGGI
	13)	SATPOL PP	1	2	5	4	5	0	0	5	0	100,00%	SANGAT TINGGI
	14)	BPBD	1	1	6	3	1	0	0	0	1	100,00%	SANGAT TINGGI
	15)	DINAS SOSIAL	1	5	7	6	8	1	2	5	0	91,83%	SANGAT TINGGI
	16)	DPMD	1	3	5	3	5	2	1	2	0	72,88%	SEDANG
	17)	DINAS PPPA	1	6	4	7	6	0	0	5	1	83,33%	TINGGI

Sumber Data: Hasil Evaluasi Bappeda Kab. Ende

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi

3.1.1 Perkembangan Perekonomian Global

Publikasi Kemenkeu pada bulan April 2024 (<https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/keuangan-negara/apbn-kita>) tentang APBN kita Kinerja dan Fakta dinyatakan bahwa Perkembangan ekonomi global di 2024 diperkirakan akan tetap stabil. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Maret 2024 memperkirakan bahwa ekonomi global di 2024 akan tetap tumbuh 3,2 persen. Negara maju diperkirakan mengalami sedikit akselerasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan negara berkembang akan sedikit melambat. Inflasi global diproyeksi berada pada level 5,9 persen (avg) di 2024. Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik akhir-akhir ini akan mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang selanjutnya akan meningkatkan harga komoditas terutama komoditas energi. Di sisi domestik, perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Perkembangan sektor eksternal nasional terus memperlihatkan perkembangan positif. Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik akhir-akhir ini akan mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang selanjutnya akan meningkatkan harga komoditas, terutama komoditas energi. Perkembangan Inflasi global dalam publikasi CNN Indonesia; Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat dan datar padatahun ini hingga 2025. Hal ini tak lepas dari inflasi di Amerika Serikat (AS), lemahnya permintaan di China dan Eropa, dan dampak ketegangan geopolitik. IMF memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil global mencapai 3,2 persen untuk 2024-2025, naik 0,1 persen dari proyeksi yang dirilis Januari lalu. Angka 3,2 persen ini berada di tingkat yang sama seperti pada 2023. 2025" "Perekonomian global terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan pertumbuhan yang stabil dan inflasi yang menurun, namun masih banyak tantangan yang menghadang," kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas seperti dikutip dari Reuters, Rabu (17/4). Menurutnya, potensi peningkatan konflik Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap Israel dapat berdampak kuat pada pertumbuhan ekonomi. Gourinchas menilai konflik itu akan menaikkan harga minyak dan inflasi. Alhasil, memicu kebijakan moneter yang lebih ketat dari bank sentral. Departemen Keuangan AS sedang Bab III -2 Lampiran/Perbup RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 bersiap untuk menjatuhkan sanksi baru kepada Iran dalam beberapa hari mendatang. Sanksi itu berupa pembatasan ekspor minyak oleh negara tersebut. Laporan Departemen Keuangan AS menggambarkan skenario buruk bahwa eskalasi Timur Tengah akan menyebabkan kenaikan harga minyak sebesar 15 persen. Pun, biaya pengiriman akan lebih tinggi. Hal ini disinyalir bakal meningkatkan inflasi global sekitar 0,7 poin persentase. IMF memperkirakan rata-rata inflasi global cuma mencapai 2,8 persen pada akhir 2024. Angka turun dibanding tahun lalu

yang mencapai 4 persen. Median inflasi global itu diproyeksikan kembali turun menjadi 2,4 persen pada 2025. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240417095656-532-1087113/imf-proyeksiekonomi-global-cuma-tumbuh-32-persen-di-2024-dan-2025>).

3.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional

Gambaran Kebijakan keuangan negara pada saat disusunnya RKPD ini, dapat dilihat pada halaman: (Publikasi Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/571-6-Mei-2024>), sebagai berikut: Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. "Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu.

Sementara itu, konsumsi oleh LNPRT melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9% (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada triwulan I 2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan. PKP menyumbang 1,1% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 terbesar ketiga setelah konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur turut mendorong aktivitas investasi bangunan. Keberlanjutan hilirisasi SDA yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Kinerja investasi sektor swasta juga tergambar dari realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri triwulan I yang tumbuh tinggi 22,1% (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang. Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih tumbuh sebesar 0,5% (yoy) ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Di sisi lain, volume ekspor produk utama seperti besi baja dan bahan bakar Bab III -3 Lampiran/Perbup RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 mineral tetap kuat, masingmasing tumbuh sebesar 35,8% dan 5,4% (yoy) pada triwulan I 2024. Sementara, impor riil juga tumbuh 1,8% (yoy) pada triwulan I 2024. Secara keseluruhan, kontribusi net ekspor (ekspor – impor) terhadap pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 0,2%. Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy), didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan

hilirisasi. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari sub sektor industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 16,6% (yoy) pada triwulan I 2024. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan positif sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 4,6% (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan. Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5% (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan panjang akibat El Nino yang menyebabkan tertundanya musim tanam. Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy). Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing semakin menguat terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara Indonesia yang meningkat sebesar 15,7% (yoy) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh 25,4% (yoy). Selain itu, aktivitas kegiatan Pemilu, liburan tahun baru, dan aktivitas selama bulan Ramadan mendorong tumbuhnya kedua sektor tersebut. Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk aktivitas pembangunan IKN, turut mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut yang tercatat sebesar 6,2% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang solid mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional.

Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun signifikan menjadi 4,82%, dari sebelumnya 5,32% pada Februari 2023, dan sudah berada dibawah TPT periode sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2019: 5,01%). Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar selama Februari 2023- Februari 2024 adalah Akomodasi & Makan Minum, Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan yang masing-masing meningkat sebesar 0,96 juta orang, 0,85 juta orang, dan 0,76 juta orang. Proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi yang positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik. Ke depan, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut, meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu tetap diwaspadai. Perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diperkirakan terus melanjutkan perbaikan, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi nonbangunan serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers' Index (PMI)

Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, khususnya pada komoditas batu bara, bijih logam, dan besi baja didukung oleh permintaan ekspor yang tetap kuat dan harga komoditas global yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh perbaikan berbagai lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu, secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan bias ke bawah dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap baik, di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan triwulan II 2022 diperkirakan mencatat surplus, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas, sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan II 2022 mencatat net inflow sebesar 0,2 miliar dolar AS. Namun demikian, memasuki triwulan III 2022 (hingga 19 Juli 2022), investasi portofolio mencatat net outflow sebesar 2,0 miliar dolar AS sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2022 tercatat sebesar 136,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, kinerja NPI pada 2022 diperkirakan akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,3% sampai dengan defisit 0,5% dari PDB terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi. Kinerja NPI tersebut juga didukung neraca transaksi modal dan finansial terutama dalam bentuk PMA sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga.

Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan yang meningkat sebagaimana juga dialami oleh mata uang regional lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Nilai tukar pada 20 Juli 2022 terdepresiasi 0,60% (ptp) dibandingkan akhir Juni 2022, namun dengan volatilitas yang terjaga. Depresiasi tersebut sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespons peningkatan tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global, di tengah persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah sampai dengan 20 Juli 2022 terdepresiasi 4,90% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia 6,41%, India 7,07%, dan Thailand 8,88%. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan pasokan valas dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Inflasi meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2022 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya

sebesar 3,55% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada 2022 diperkirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

3.1.3 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Nusa Tenggara Timur

Gambaran Ekonomi Makro Regional Provinsi NTT, disadur dari BPS NTT, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024, sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT.

Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 3,61 persen. Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I-2024 mencapai Rp 32,02 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 18,40 triliun. Ekonomi NTT Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 3,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan <https://ntt.bps.go.id> x | ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 15,22 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,31 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada Triwulan I-2024 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,14 persen. Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I-2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,88 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 68,13 persen.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 3,99 juta orang, naik 0,08 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 2,26 persen poin dibanding Februari 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,96 juta orang, naik sebanyak 0,14 juta orang dari Februari 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,04 juta orang. Sebanyak 0,07 juta orang (25,83 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik Bab III -8 Lampiran/Perbup RKPd Kabupaten Ende Tahun 2025 sebesar 0,98 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah pengangguran naik sebesar 0,27 persen poin, sementara pekerja paruh waktu juga mengalami peningkatan sebesar 0,72 persen poin dibanding Februari

2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,17 persen, naik sebesar 0,07 persen poin dibanding Februari 2023.

3) Tingkat Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Maret 2023 turun menjadi 19,96 persen Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan meningkat sebanyak 8,8 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 135,57 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,7 ribu orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518,- (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp117.685,- (23,20 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498,- /rumah tangga miskin/bulan.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,21 menjadi 13,22 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 7,70 tahun menjadi 7,82 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 371 ribu rupiah (4,71 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

5) Inflasi Provinsi NTT April 2024

Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,35 persen Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,35

persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,18. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,59 persen dengan IHK sebesar 106,18 dan terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,83 persen dengan IHK sebesar 106,08. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,54 persen; kelompok transportasi sebesar 1,65 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,77 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang Bab III -9 Lampiran/Perbup RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2024 adalah sebesar 0,31 persen. Sedangkan untuk tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan April 2024 adalah sebesar 0,98 persen.

3.1.4 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ende

Gambaran tentang Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ende dapat dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Ende. Mengacu kepada data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Ende, dalam buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024, dapat diketahui bahwa Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku 2010 untuk kondisi pada tahun 2023 mencapai 7.374,38 milyar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 581,76 milyar dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 6.792,62 milyar rupiah. sedangkan Nilai PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Ende pada tahun 2023 meningkat yaitu mencapai 4.457.690 miliar rupiah atau naik dari 4.291.787 miliar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan terjadi ekspansi ekonomi sebesar 3,87 persen mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang mencapai 3,09 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 11,29 persen. Lapangan Usaha ini mengalami kondisi yang terus meningkat, dimana setelah mengalami penurunan sebesar 1,46 pada tahun 2021, selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 6,75 pada tahun 2022 dan terus bertumbuh positif menjadi sebesar 11,29 persen pada tahun 2023.

Dari 17 lapangan usaha yang ada, 17 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, 11 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas agregat, 6 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dibawah pertumbuhan ekonomi agregat, yaitu:

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,60), Industri Pengolahan (8,47), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang (2,79), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (5,64), Transportasi dan Pergudangan (2,69), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15,34). Dilihat dari Struktur Ekonomi selama lima tahun terakhir Struktur Perekonomian Kabupaten Ende, dilihat dari peranan masing-masing Lapangan Usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende, didominasi oleh 5 (lima) kategori Lapangan Usaha, yaitu: (1) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Konstruksi; dan Lapangan Usaha (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende Tahun 2023, yaitu mencapai 31,69 persen, selanjutnya Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,19 persen, Jasa Pendidikan sebesar 9,32 persen; Konstruksi sebesar 9,11 persen; dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,70 persen.

Tabel 12.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ende (persen), 2019–2023
Table 12.4 Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Ende Regency (percent), 2019–2023

Lapangan Usaha/ Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing			4,57	2,49	5,14
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying			5,40	-1,89	0,49
C Industri Pengolahan/Manufacturing			11,41	-4,32	-0,87
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas			0,33	10,83	1,46
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities			4,46	6,98	6,50
F Konstruksi/Construction			4,04	-9,88	2,17
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles			7,13	-6,22	2,27
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage			3,35	12,60	0,79
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities			4,96	-24,94	3,72
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication			4,28	12,29	5,48
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities			3,55	9,39	2,80
L Real Estate/Real Estate Activities			2,63	2,61	2,50
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities			0,38	0,23	0,19
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security			9,83	10,29	9,88
P Jasa Pendidikan/Education			10,34	10,78	10,36
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities			1,74	1,93	1,97
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services/Activities			2,44	2,05	1,91
				1,88	1,88
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product			100,00	100,00	100,00
				100,00	100,00

Data 2022 : Angka Sementara
Data 2023 : Angka Sangat Sementara

Sementara gambaran tentang Inflasi di Kabupaten Ende, dapat dilihat dari publikasi BPS Kabupaten Sumba Timur tentang kondisi Inflasi yang terjadi di Kabupaten

Sumba Timur dan cenderung mengalami kondisi yang hampir sama dengan Kabupaten Ende. Rilis data BPS Kabupaten Sumba Timur dimaksud, bahwa Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Waingapu sebesar 2,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,25. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 8 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,9 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,77 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,79 persen; kelompok transportasi sebesar 7,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,44 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Waingapu masing-masing sebesar 0,52 dan 1,3 persen. (<https://sumbatimurkab.bps.go.id/pressrelease/2024/04/04/75/maret-2024-inflasiyear-on-year--y-on-y--kota-waingapu-sebesar-2-15-persen.htm>)

3.2 Perubahan Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perubahan Rincian Postur *Outlook* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan perubahan data, kesalahan hitung dan/atau selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi fisik Sesuai dengan Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan dengan adanya perubahan kebijakan syarat penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, mengakibatkan perubahan data penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2022, maka perlu dilakukan perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/ 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022.

Perubahan kerangka pendanaan yang menjadi pertimbangan dilakukan perubahan RKPD, diperkirakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

3.2.1 Pendapatan Daerah

- Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional;
- Penyesuaian pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan transfer antar daerah terutama komponen Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak dan dana bagi hasil provinsi, dengan merujuk pada:
 - 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022
 - 3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terutama penyesuaian pada penerimaan Dana BOS.

Dari Tabel 3.6 Rancangan Struktur Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 menunjukan bahwa pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan akan mengalami penambahan 0,42% atau sebesar Rp. 5.391.412.398. dari pagu awal APBD sebesar Rp.1.269.738.677.856. sehingga pagu Pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.275.130.090.254. Penambahan tersebut terdapat pada beberapa komponen pendapatan, antara lain :

- a. **Pos Pendapatan Transfer** diasumsikan mengalami penambahan sebesar 0,15%, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Transfer Pusat khusus pada pos Dana Perimbangan dan Dana Desa tahun 2024 masih belum mengalami perubahan dari pagu awal, dimana dana Perimbangan pagu awal sebesar Rp. 929.185.296.00 Porsentase masih 0,00% dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 207.984.236.999.
 - 2) Pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah khusus pada pos Pendapatan Bagi Hasil Provinsi terjadi penambahan pagu sebesar 4,68% atau sebesar Rp.1.804.856.971 dari target awal Rp.38.584.090.676 menjadi Rp.40.388.947.593. Penambahan komponen ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggar Timur Nomor: 900/73/BKUD4/2024 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggra Timur Tahun Anggran 2023 kepda Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur.
- b. **Pada Kompenen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** mengalami penambahan pagu sebesar 19,74% atau sebesar Rp.2.468.860.632 dari yang ditetapkan pada awal APBD TA. 2024 yaitu sebesar Rp.12.505.212.780 menjadi Rp.14.974.073.412.

Tabel 3.6 Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4 (3-2)	5
PENDAPATAN DAERAH	1.269.738.677.856	1.275.130.090.254	5.391.412.398	0,42
Pendapatan Asli daerah (PAD)	81.479.842.400	82.597.537.249	1.117.694.849	1,37
Pajak Daerah	34.158.224.500	33.138.224.500	- 1.020.000.000	-2,99

Retribusi Daerah	6.522.400.000	5.638.548.000	-883.852.000	- 13,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	2.225.557.093	- 2.274.442.907	- 50,54
Lain-Lain PAD Yang Sah	36.299.217.900	41.595.207.656	5.295.989.756	14,59
Pendapatan Transfer	1.175.753.622.676	1.177.558.479.593	1.804.856.917	0,15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.137.169.532.000	1.137.169.532.000	0	0,00
Dana Perimbangan	929.185.296.000	929.185.296.000	0	
DTU - Dana Bagi Hasil (DBH)	7.878.390.000	7.878.390.000	0	0,00
DTU - Dana Alokasi Umum (DAU)	670.443.911.000	670.443.911.000	0	0,00
DTU - Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	93.745.456.000	93.745.456.000	0	0,00
DTU - Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	157.117.539.000	157.117.539.000	0	0,00
Dana Desa	207.984.236.000	207.984.236.000	0	0,00
Dana Desa (DD)	207.984.236.000	207.984.236.000	0	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.584.090.676	40.388.947.593	1.804.856.917	4,68
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.584.090.676	40.388.947.593	1.804.856.917	4,68
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.505.212.780	14.974.073.412	2.468.860.632	19,74
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.505.212.780	14.974.073.412	2.468.860.632	19,74

Sumber data: BPKAD Kab. Ende

3.2.2 Belanja Daerah

1. Pada Komponen Belanja Daerah Khususnya pada Belanja Operasi terjadi penambahan pagu sebesar 3,32 % atau sebesar 27.043.324.651 dari target awal sebesar Rp. 851.518.298.320 menjadi Rp. 842.561.622.971. Sedangkan Pada Komponen Belanja Modal dari pagu awal sebesar Rp. 171.413.215.136 terjadi penambahan pagu sebesar 0,72% atau sebesar Rp.1.234.783.054 dari pagu awal rancangan Perubahan tahun 2024 menjadi Rp. 172.647.998.190.
2. Pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Belanja Daerah mengalami pergeseran, pengurangan dan penambahan, sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/ 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024), antara lain:
 - 1) Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan

- ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;
- 2) Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana pada point (1) diarahkan penggunaannya, termasuk juga untuk Perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
 - 4) Alokasi yang merupakan alokasi untuk membayar kegiatan pihak ketiga tahun sebelumnya dan kegiatan mendesak Perangkat Daerah.

Tabel 3.7 Proyeksi Perubahan Belanja Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4 (3-2)	5
BELANJA DAERAH	1.264.738.677.856	1.296.330.608.011	31.591.930.155	2,50
Belanja Operasi	815.518.298.320	842.561.622.971	27.043.324.651	3,32
Belanja Pegawai	500.818.730.859	500.315.318.602	-503.412.257	-0,10
Belanja Barang dan Jasa	240.805.955.439	267.089.092.347	26.283.136.908	10,91
Belanja Hibah	73.801.362.022	75.064.962.022	1.263.600.000	1,71
Belanja Bantuan Sosial	92.250.000	92.250.000	0	0,00
Belanja Modal	171.413.215.136	172.647.998.190	1.234.783.054	0,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.921.441.561	36.204.860.135	283.418.574	0,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.228.200.256	56.270.054.736	41.854.480	0,07
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.974.924.254	72.903.334.254	928.410.000	1,29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.258.649.065	7.258.649.065	0	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	11.100.000	-18.900.000	-63,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
Belanja Transfer	275.807.164.400	279.120.986.850	3.313.822.450	1,20
Belanja Bantuan Keuangan	275.807.164.400	279.120.986.850	3.313.822.450	1,20
SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000.000	-21.200.517.757	-26.200.517.757	-524,01

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pada Komponen Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 pagu awalnya Rp.0 dan pada perubahan diasumsikan sebesar Rp. 26.200.517.757 dari total penerimaan pembiayaan.

Tabel 3.8 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4 (3-2)	5
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	0	26.200.517.757	26.200.517.757	0,00
SILPA	0	26.200.517.757	26.200.517.757	0,00
SILPA	0	26.200.517.757	26.200.517.757	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTT	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	-5.000.000.000	21.200.517.757	26.200.517.757	-524,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,00

Sumber data: BPKAD Kab. Ende

Selanjutnya untuk melihat data perbandingan antara Pagu Indikatif pada Penetapan RKPD Tahun 2024 dengan Penetapan APBD Tahun 2024 serta Perubahan RKPD Tahun 2024, disajikan pada Tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9. Perubahan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No.Rek	URAIAN	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu Penetapan APBD 2024	Pagu Indikatif Perubahan RKPD (revisi III) 2024	Bertambah/ Berkurang (RKPD Induk vs APBD Induk)	Bertambah/ Berkurang (RKPD Induk vs Perubahan RKPD)	Bertambah/ Berkurang (APBD Induk vs Perubahan RKPD)	% Perubahan (RKPD Induk vs APBD Induk)	% Perubahan (RKPD Induk vs Perubahan RKPD)	Perubahan (APBD Induk vs Perubahan RKPD)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PENDAPATAN	1.477.000.000.000	1.269.738.677.856	1.275.130.090.254	207.261.322.144	201.869.909.746	5.391.412.398	-14,03	- 13,67	0,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126.250.000.000,00	81.479.842.400	82.597.537.249	44.770.157.600,00	43.652.462.751	5.391.412.398	- 35,46	- 34,58	1,37
4.1.1	Pajak Daerah	51.490.000.000	34.158.224.500	82.597.537.249	17.331.775.500	31.107.537.249	48.439.312.749	- 33,66	60,41	141,81
4.1.2	Retribusi Daerah	11.450.000.000	6.522.400.000	33.138.224.500	4.927.600.000	21.688.224.500	26.615.824.500	- 43,04	189,42	408,07
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.980.000.000	4.500.000.000	2.225.557.093	-480.000.000	2.754.442.907	2.274.442.907	- 9,64	- 55,31	-50,54
4.1.4	Lain - Lain PAD Yang Sah	58.330.000.000	36.299.217.900	41.595.207.656	22.030.782.100	16.734.792.344	5.295.989.756	- 37,77	- 28,69	14,59
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.309.000.000.000	1.175.753.622.676	1.177.558.479.593	133.246.377.324	131.441.520.407	1.804.856.917	- 10,18	- 10,04	0,15
4.2.0	Transfer Pemerintah Pusat		1.137.169.532.000	1.137.169.532.000	1.137.169.532.000	1.137.169.532.000	0	0	0	-

4.2.1.1	DANA PERIMBANGAN		929.185.296.00	929.185.296.00	929.185.296.00	929.185.296.00	0	0	0	-
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	37.140.000.00	7.878.390.000	7.878.390.000	29.261.610.00	29.261.610.00	0	- 78,79	- 78,79	-
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	630.750.000.00	670.443.911.00	670.443.911.00	39.693.911.00	39.693.911.00	0	6,29	6,29	-
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	240.240.000.00	93.745.456.00	93.745.456.000	146.494.544.00	146.494.544.00	0	- 60,98	- 60,98	-
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100.000.000.00	157.117.539.00	157.117.539.00	57.117.539.00	57.117.539.00	0	57,12	57,12	-
4.2.1.2	DANA INSENTIF DAERAH	14.940.000.00			14.940.000.00	14.940.000.00	0	- 100,00	- 100,00	0
4.2.1.3	DANA OTONOMI KHUSUS				0	0	0	0	0	0
4.2.1.5	DANA DESA	221.970.000.00	207.984.236.00	207.984.236.00	13.985.764.00	13.985.764.00	0	- 6,30	- 6,30	-
04.02.02	Transfer Antar Daerah	64.860.000.00	38.584.090.67	40.388.947.593	26.275.909.32	24.471.052.40	1.804.856.91	- 40,51	-37,73	4,68
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	64.860.000.00	38.584.090.67	40.388.947.593	26.275.909.32	24.471.052.40	1.804.856.91	- 40,51	- 37,73	4,68
4.2.2.2	• Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau				0	0	0	0	0	0

	Pemerintah Daerah Lainnya									
04.03	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.940.000.00 0	12.505.212.78 0	14.974.073.412	28.434.787.22 0	25.965.926.58 8	2.468.860.63 2	- 69,45	- 63,42	19,74
04.03.03	• Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		12.505.212.78 0	14.974.073.412	12.505.212.78 0	14.974.073.41 2	2.468.860.63 2	0	0	19,74
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan				0	0	0	0	0	0
4.3.3.1.1	Pendapatan Hibah Dana BOS				0	0	0	0	0	0
4.3.3.1.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0	0	0	0	0	0
05.00	BELANJA	1.008.530.000.000	1.264.738.677.856	1.296.330.608.011	256.208.677.856	287.800.608.011	31.591.930.155	25,40	28,54	2,50
05.01	BELANJA OPERASI	977.570.000.000	815.518.298.320	842.561.622.971	162.051.701.680	135.008.377.029	27.043.324.651	-16,58	- 13,81	3,32
05.01.01	Belanja Pegawai	559.970.000.000	500.818.730.859	500.315.318.602	59.151.269.141	59.654.681.398	-503.412.257	- 10,56	-10,65	- 0,10
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		391.240.269.070	390.880.269.970	391.240.269.070	390.880.269.970	-359.999.100	0	0	- 0,09
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		22.910.551.886	22.110.551.886	22.910.551.886	22.110.551.886	-800.000.000	0	0	- 3,49
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan		62.435.872.725	64.470.583.734	62.435.872.725	62.435.872.725	2.034.711.009	0	0	3,26

	pertimbangan objektif lainnya ASN									
5.1.01.04	Belanja dan gaji tunjangan DPRD		13.426.252.17 8	13.443.053.912	13.426.252.17 8	13.443.053.91 2	16.801.734	0	0	0,13
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	481.570.000.0 00	350.000.000	75.000.000	481.220.000.0 00	481.495.000.0 00	-275.000.000	- 99,93	- 99,98	-78,57
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		609.900.000	489.975.000	609.900.000	489.975.000	-119.925.000	0	0	-19,66
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.100.000.000			1.100.000.000	1.100.000.000	0	- 100,00	- 100,00	0
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS		9.348.036.000	9.348.036.000	9.348.036.000	9.348.036.000	0	0	0	-
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD		497.849.000	497.849.000	497.849.000	497.849.000	0	0	0	-
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	346.110.000.0 00	240.805.955.4 39	267.089.092.34 7	105.304.044.5 61	79.020.907.65 3	26.283.136.9 08	-30,43	- 22,83	10,91
5.1.2.01	Belanja Barang		79.746.037.76 2	81.956.233.820	79.746.037.76 2	81.956.233.82 0	2.210.196.05 8	0	0	2,77
5.1.2.02	Belanja Jasa		67.343.488.27 7	76.903.163.890	67.343.488.27 7	76.903.163.89 0	9.559.675.61 3	0	0	14,20
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan		1.963.378.660	1.622.911.910	1.963.378.660	1.622.911.910	-340.466.750	0	0	- 17,34
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas		47.389.678.81 4	53.911.908.052	47.389.678.81 4	53.911.908.05 2	6.522.229.23 8	0	0	

										13,76
5.1.2.0 5	Belanja Uangdan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat		7.900.155.000	8.007.569.000	7.900.155.000	8.007.569.000	107.414.000	0	0	1,36
5.1.2.0 6	Belanja barang dan jasa BOS		10.835.999.18 5	10.835.999.185	10.835.999.18 5	10.835.999.18 5	0	0	0	-
5.1.2.0 7	Belanja barang dan jasa BLUD		25.627.217.74 1	33.581.306.490	25.627.217.74 1	33.581.306.49 0	7.954.088.74 9	0	0	31,04
05.01. 03	Belanja Bunga	11.250.000.00 0			- 11.250.000.00 0	- 11.250.000.00 0	0	- 100,00	- 100,00	0
05.01. 04	Belanja Subsidi	60.000.000.00 0			- 60.000.000.00 0	- 60.000.000.00 0	0	- 100,00	- 100,00	0
05.01. 05	Belanja Hibah		73.801.362.02 2	75.064.962.022		75.064.962.02 2	1.263.600.00 0	0	0	1,71
05.01. 05	Belanja Hibah Pemerintah Pusat		50.412.542.00 0	51.912.542.000	50.412.542.00 0	51.912.542.00 0	1.500.000.00 0	0	0	2,98
05.01. 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia		19.800.360.00 0	19.563.960.000	19.800.360.00 0	19.563.960.00 0	-236.400.000	0	0	-1,19

05.01.05	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		757.160.022	757.160.022	757.160.022	757.160.022	0	0	0	-
05.01.06	Belanja Bansos	240.000.000	2.831.300.000	2.831.300.000	2.591.300.000	2.591.300.000	0	1.079,71	1.079,71	-
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		92.250.000	92.250.000	92.250.000	92.250.000	0	0	0	-
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				0	0	0	0	0	0
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				0	0	0	0	0	0
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				0	0	0	0	0	0
05.02	BELANJA MODAL	189.750.000.00	171.413.215.136	172.647.998.190	18.336.784.864	17.102.001.810	1.234.783.054	- 9,66	- 9,01	0,72
05.02.01	Belanja Modal Tanah				0	0	0	0	0	0
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah				0	0	0	0	0	0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan	41.520.000.00	35.921.441.561	36.204.860.135	5.598.558.439	5.315.139.865	283.418.574	- 13,48	- 12,80	

	Mesin									0,79
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar		186.000.000	193.000.000	186.000.000	193.000.000	7.000.000	0	0	3,76
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		1.942.000.000	1.921.000.000	1.942.000.000	1.921.000.000	-21.000.000	0	0	- 1,08
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				0	0	0	0	0	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian		13.875.000	13.875.000	13.875.000	13.875.000	0	0	0	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		8.132.369.117	8.358.448.232	8.132.369.117	8.358.448.232	226.079.115	0	0	2,78
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		3.034.034.880	3.034.034.880	3.034.034.880	3.034.034.880	-	0	0	-
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		3.856.043.750	3.873.571.762	3.856.043.750	3.873.571.762	17.528.012	0	0	0,45
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium		7.922.168.260	8.127.313.260	7.922.168.260	8.127.313.260	205.145.000	0	0	2,59
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		1.800.671.545	1.785.270.553	1.800.671.545	1.785.270.553	-15.400.992	0	0	- 0,86
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				0	0	0	0	0	0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu		1.297.550.000	1.255.800.000	1.297.550.000	1.255.800.000	-41.750.000	0	0	-3,22
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		3.685.795.750	3.685.795.750	3.685.795.750	3.685.795.750	0	0	0	-

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	-
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		4.044.933.259	3.950.750.698	4.044.933.259	3.950.750.698	-94.182.561	0	0	- 2,33
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.050.000.000	56.228.200.256	56.270.054.736	- 2.821.799.744	- 2.779.945.264	41.854.480	- 4,78	- 4,71	0,07
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		54.834.280.256	55.011.263.136	54.834.280.256	55.011.263.136	176.982.880	0	0	0,32
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen				0	0	0	0	0	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		563.920.000	838.791.600	563.920.000	838.791.600	274.871.600	0	0	48,74
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		830.000.000	420.000.000	830.000.000	420.000.000	-410.000.000	0	0	- 49,40
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.130.000.000	71.974.924.254	72.903.334.254	- 11.155.075.746	- 10.226.665.746	928.410.000	- 13,42	- 12,30	1,29
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		43.405.743.500	44.617.153.500	43.405.743.500	44.617.153.500	1.211.410.000	0	0	2,79
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		10.035.087.000	9.752.087.000	10.035.087.000	9.752.087.000	-283.000.000	0	0	- 2,82
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi		4.114.000.000	4.114.000.000	4.114.000.000	4.114.000.000	0	0	0	-
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan		14.420.093.754	14.420.093.754	14.420.093.754	14.420.093.754	0	0	0	-

05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.050.000.000	7.258.649.065	7.258.649.065	1.208.649.065	1.208.649.065	-	19,98	19,98	-
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		2.821.500.000	2.821.500.000	2.821.500.000	2.821.500.000	0	0	0	-
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				0	0	0	0	0	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				0	4.433.149.065	0	0	0	0
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		4.433.149.065	4.433.149.065	4.433.149.065	4.000.000	-	0	0	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		4.000.000	4.000.000	4.000.000	11.100.000	-	0	0	-
	Belanja Modal Aset Lainnya		30.000.000	11.100.000	30.000.000	11.100.000	- 18.900.000	0	0	- 63,00
	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		30.000.000	11.100.000	30.000.000	11.100.000	-18.900.000	0	0	- 63,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	- 8.000.000.000	- 8.000.000.000	0	- 80,00	- 80,00	-
05.04	BELANJA TRANSFER	279.780.000.000	275.807.164.400	279.120.986.850	- 3.972.835.600	- 659.013.150	3.313.822.450	- 1,42	- 0,24	1,20
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.000.000.000			- 4.000.000.000	- 4.000.000.000	0	- 100,00	-100,00	0
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.780.000.000	275.807.164.400	279.120.986.850	27.164.400	3.340.986.850	3.313.822.450	0,01	1,21	1,20

	SURPLUS / (DEFISIT)				0	0	0	0	0	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH				0	0	0	0	0	0
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.000.000.00 0		26.200.517.757		- 33.799.482.24 3	26.200.517.7 57	-100,00	-56,33	0
06.01. 01	SILPA TA. Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah			26.200.517.757	0	26.200.517.75 7	26.200.517.7 57	0	0	0
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0	-	-	-
06.02. 01	Pembentukan Dana Cadangan				0	0	0	0	0	0
06.02. 02	Penyertaan Modal (Investasi)		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0	-
06.03. 03	Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Cicilan Pinjaman Daerah	75.000.000.00 0			- 75.000.000.00 0	- 75.000.000.00 0	0	-100,00	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO		5.000.000.000	26.200.517.757	5.000.000.000	26.200.517.75 7	21.200.517.7 57	0	0	424,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN									

Sumber data: BPKAD dan Hasil Olahan Bappeda

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Bab ini memuat penjelasan tentang Tujuan, Sasaran dan Prioritas yang menjadi fokus pembangunan suatu daerah. Mengingat bahwa pembangunan Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Terakhir RPJMD Tahun 2019-2024, maka perumusan prioritas dan sasaran, diarahkan dalam rangka memastikan dan memantapkan seluruh sasaran dan target pembangunan RPJMD. Disajikan dalam 2 (dua) bagian yaitu 1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, dan 2) Prioritas Pembangunan Daerah, yang menggambarkan prioritas pembangunan jangka menengah pada tahun rencana (2024). Perumusan Sasaran dan prioritas didasarkan pada hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024, analisis capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan sebagaimana disajikan pada Bab II, serta memerhatikan rancangan kerangka ekonomi dan perubahan kerangka pendanaan yang disajikan pada Bab III.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende

Mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJP 2005-2025), serta memerhatikan kondisi riil, permasalahan, dan isu-isu strategis, telah dirumuskan Visi Kabupaten Ende dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, yang merupakan kelanjutan Periode tahun 2014-2019, yaitu: **MEWUJUDKAN KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 5 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat
- 3) Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan
- 4) Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan
- 5) Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

Tabel 4.1. Hubungan Visi Misi RPJMD 2019-2024 dengan arahan RPJP 2005-2025

VISI JANGKA MENENGAH	VISI JANGKA PANJANG
VISI RPJMD 2019-2024 MEWUJUDKAN KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	VISI RPJP 2005-2025 TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
MISI RPJMD KAB. ENDE TAHUN 2019-2024	ARAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025
• MISI 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	• Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan untuk seluruh wilayah Kabupaten Ende; • Target IPM mencapai angka 80; • Target Angka partisipasi kasar SD/MI menjadi 110, SMP/MTs menjadi 85 dan SMA/MA menjadi 80.
• MISI 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	• Peningkatan kualitas dan pemerataan kesehatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Ende; • Angka Kematian Bayi menurun menjadi sebesar 3/1000 Kelahiran Hidup; • Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 3 kasus.
• MISI 3: Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan	• Peningkatan ekonomi rakyat melalui pola pengembangan wilayah terpadu; • Target Kemiskinan menurun menjadi 12%; • Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%; • Pendapatan perkapita masyarakat Ende Rp.12.000.000,-.

VISI JANGKA MENENGAH	VISI JANGKA PANJANG
MISI 4: Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan	- Membangun dan menata Sumberdaya Air dan DAS, Akses Air Bersih dan Tata Kelola Pemukiman yang baik; - Mewujudkan Kabupaten Ende sebagai wilayah keseimbangan lingkungan (ekosistem), melalui upaya rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan dan lahan kritis, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.
MISI 5: Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat	- Mewujudkan komitmen yang tinggi dari setiap pelaku pembangunan dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek pembangunan; - Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat; - Tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM; - Pembangunan yang responsif gender.

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, ditetapkan **Tujuan dan Sasaran** pembangunan Kabupaten Ende, yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan prioritas pembangunan tahunan (RKPD). Tujuan dan sasaran merupakan prioritas tertinggi yang menggambarkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Gambaran hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende

MISI	TUJUAN	SASARAN
VISI : “MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”		
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi	1.1. Masyarakat Ende yang berprestasi dan memiliki moral dan Akhlak Mulia	1.1.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Masyarakat Ende Yang Sehat	2.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan	3.1. Meningkatnya Atifitas Perekonomian	3.1.1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (<i>prime Mover</i>); 3.1.2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan,Transportasi dan Pergudangan) 3.1.3. Meningkatnya Investasi.
	3.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	3.2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai sektor Dominan dan Penunjang Pangan Utama; 3.2.2 Menurunkan Tingkat Pengangguran 3.2.3 Meningkatnya Pengendalian Inflasi

MISI	TUJUAN	SASARAN
4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan	4.1. Menurunnya Kesenjangan Wilayah	4.1.1. Meningkatnya Pemerataan Ketersedian Infrastruktur Dasar Sosial dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan; 4.1.2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat	5.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (<i>good governance</i>)	5.1.1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien; 5.1.2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat;

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024

4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Sasaran Pembangunan

Sasaran dan target pembangunan daerah Kabupaten Ende pada tahun 2024, dapat dilihat pada target capaian Indikator Makro pada table dibawah ini:

Tabel 4.3 Target Capaian Indikator Makro Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024 (P-RPJMD KAB. ENDE)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,63	67,97
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,87	5,65
3	Angka Kemiskinan	Persen	22,86	20,52
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,59	2,12
5	Gini Ratio	Angka	0,306	0,31
6	Laju Inflasi	Persen	4,96	<5
7	Nilai Investasi	Trilyun	4,12	4,3
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	B
9	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,81	96,69
10	Ratio PAD	Persen	6,38	10,67
11	PDRB per Kapita	Rp. Juta	24,83	27,62
12	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO ²	n/a	17.248.829
13	Prevalensi Stunting	Persen	6,80	0 (disesuaikan dengan target nasional)

4.2.2 Perumusan Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2024, merupakan penjabaran program pembangunan Kabupaten Ende yang disusun untuk menjawab isu strategis pembangunan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2024. Prioritas Pembangunan memuat program unggulan Bupati /Wakil Bupati Ende periode 2019-2024 dan program prioritas seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemkab Ende. Beberapa Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ende, sebagai berikut:

1. **Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan**
Data menunjukkan pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar 23,00 persen atau kurang lebih masih sebanyak 63.400 ribu penduduk miskin, dengan garis kemiskinan sebesar 473.403 ribu/kap/bulan dan cenderung meningkat tiap tahunnya
2. **Stunting**
Masih terdapat kasus Stunting yang ada di masyarakat, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan berdampak terhadap kualitas generasi muda Kabupaten Ende ke depannya. Data prevalensi Stunting di Kabupaten Ende sampai dengan tahun 2022, sebesar 8,90 persen atau sebanyak 1.749 Bayi/Balita Stunting, dan masih ada kasus Stunting di 239 Desa / 21 Kecamatan.
3. **Pengembangan ekonomi daerah dalam kerangka konsep Membangun Masyarakat Ekonomi NTT dengan memerhatikan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Kabupaten Ende**
Berdasarkan data statistik, menunjukkan bahwa Sektor Unggulan di Kabupaten Ende adalah Sektor Pengolahan. Sementara Sektor Dominan yaitu Pertanian dan Perikanan yang merupakan sektor yang digeluti sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ende, harus didorong untuk memberikan Nilai Tambah bagi Petani dan Nelayan.
4. **Pengembangan Pariwisata sebagai sektor penggerak utama ekonomi Kabupaten Ende.**
Pengembangan pariwisata Kabupaten Ende selalu menjadi isu pembangunan Kabupaten Ende, dengan destinasi utama andalan adalah: Danau Kelimutu, dan Situs Bung Karno. Sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata saat ini, akan didorong destinasi-destinasi pendukung, antara lain: Pengembangan Wisata Kuliner Pantai Ende, Wisata Air Panas Detusoko, Wisata Aerosport Paralayang, Optimalisasi potensi wisata adat dan budaya yang tersebar hampir diseluruh wilayah kabupaten Ende, serta Pengembangan Wisata Alam. Upaya pengintegrasian dengan konsep pengembangan pariwisata Labuan Bajo sebagai pariwisata premium oleh Pemerintah Pusat, maka pariwisata Kabupaten Ende diarahkan untuk mendukung satu kesatuan Konsep Pariwisata Flores/Destinas Flores.
5. **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan dukungan daerah terhadap Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan.**
Isu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dukungan daerah terhadap pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan akan menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Ende dalam pelaksanaan pembangunan. Secara khusus terkait pemenuhan SPM menjadi prioritas untuk masing-masing perangkat daerah teknis pelaksana.
6. **Reformasi Birokrasi dan tuntutan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik**
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ende masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
 - 1) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan,
 - 2) Kinerja profesionalisme aparatur yang masih perlu ditingkatkan dan dukungan sarana prasarana pemerintah penunjang layanan publik yang masih belum memadai,
 - 3) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah untuk menjadi sumber PAD.
 - 4) Kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan yang masih perlu ditingkat; dan
 - 5) Kolaborasi 4embangan dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten belum sepenuhnya optimal untuk mengatasi permasalahan di daerah.

Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan meliputi 1) Program Rutin Perkantoran dan 2) Program terkait urusan pemerintahan (wajib dan pilihan). Sementara itu dalam konteks program prioritas diterjemahkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. **Program Pembangunan Daerah:** berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati, diterjemahkan ke dalam 12 (dua belas) Program Pembangunan Daerah (Propeda), yaitu:

1) Program Ende Pintar, Ende Juara dan Ende Berbudaya

Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang unggul di masa depan, dengan melakukan pembinaan sejak usia dini hingga pendidikan dasar, melalui penyediaan biaya operasional, sarana dan prasarana pendukung belajar-mengajar, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan literasi, pembinaan minat dan bakat di bidang olahraga, seni dan budaya, serta upaya pelestarian terhadap budaya lokal. Dengan demikian ke depan akan menghasilkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang berprestasi di semua bidang dan berperilaku beradab sesuai adat dan budaya setempat.

2) Program Ende Sehat

Program ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang unggul di masa depan, dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende, serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan stunting dan pengendalian penduduk. Dengan demikian ke depan akan menghasilkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang sehat dan kokoh dalam menghadapi tantangan jaman.

3) Program Pengembangan Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi pariwisata Kabupaten Ende sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover), dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende serta meningkatkan lama hari tinggal dari para wisatawan tersebut, melalui penataan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung obyek dan daya tarik wisata potensial yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan, serta penyelenggaraan even-even pariwisata berskala nasional dan internasional.

4) Program Pengembangan Sektor Unggulan dan Potensial

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah yang merupakan usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Ende, melalui wadah koperasi dan fungsi Bumdes sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat desa serta pengembangan pasar sebagai pusat pemasaran produk usaha kecil, mikro dan menengah yang digeluti oleh masyarakat.

5) Program Pengembangan Investasi

Program ini bertujuan untuk mempermudah proses berinvestasi di Kabupaten Ende bagi para pemilik modal melalui promosi potensi unggulan daerah dan kemudahan dalam perijinan.

6) Program Pengembangan Sektor Dominan

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan usaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang banyak diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Ende, melalui intervensi sejak dari proses produksi sampai dengan pasca produksi.

7) Program Penurunan Angka Pengangguran

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kapasitas para wirausahawan muda, melalui pelatihan-pelatihan dan bantuan usaha bagi para wirausahawan baru. Dengan bertumbuhnya para wirausahawan baru, akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi para pencari kerja.

8) Program Pengendalian Inflasi Daerah

Program ini dimaksudkan untuk mengatasi inflasi daerah yang berdampak kepada tingginya harga barang kebutuhan masyarakat di pasaran, melalui penguatan peran dan fungsi dari Tim Penanggulangan inflasi daerah (TPID) dan Tim Ekonomi Daerah.

9) Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar, seperti rumah layak huni yang dibutuhkan masyarakat, irigasi untuk pertanian, dan pengolahan sampah perkotaan, serta upaya untuk meningkatkan akses transportasi antar wilayah dari serta ke wilayah-wilayah produktif menuju pasar.

10) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

Program ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat perdesaan, seperti: Listrik, akses transportasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam perencanaan sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

11) Program Reformasi untukPeningkatan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan kinerja birokrasi yang adaptif, inovatif dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki agar berhasil guna dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, cepat dan tepat serta pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan.

12) Program Penanganan Masalah Sosial

Program ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, berkaitan dengan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengannya.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2024

Berdasarkan proses perumusan sebagaimana diuraikan pada subbab 4.2.1, serta memerhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan (sub bab 4.1.3), ditetapkan **12 (dua belas) Program Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2024**, yang pada prinsipnya mendukung 7 (tujuh) Prioritas Daerah (PD) Provinsi NTT Tahun 2022 dan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Pusat

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		PRIORITAS PROVINSI (PD)	PRIORITAS NASIONAL (PN)
1.	ENDE PINTAR, ENDE JUARA DAN ENDE BERBUDAYA	1.	Penyediaan BOP PAUD	PP 2	PN 3
		2.	Bantuan Alat Permainan Edukatif	PP 2	PN 3
		3.	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	PP 2	PN 3
		4.	Dukungan Insentif bagi Guru Honorer Komite Sekolah	PP 2	PN 3
		5.	Pelaksanaan Kejar Paket A dan Paket B	PP 2	PN 3
		6.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	PP 2	PN 3
		7.	Pendampingan PKH	PP 2	PN 3
		8.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	PP 2	PN 4
		9.	Pengembangan Internet untuk Sekolah	PP 2	PN 3
		10.	Pengembangan Ujian Nasional Berbasis Komputer	PP 2	PN 3
		11.	Peningkatan Kapasitas & Fungsi Pengawas, Tenaga Pendidik dan Kependidikan	PP 2	PN 3
		12.	Koordinasi Pelaksanaan Turnamen Olahraga Bupati Cup	PP 2	PN 3
		13.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah	PP 2	PN 3
		14.	Pembangunan Kolam Renang Skala Nasional	PP 2	PN 3
		15.	Pembangunan GOR	PP 2	PN 3
		16.	Lomba Seni Budaya	PP 2	PN 4
		17.	Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya	PP 2	PN 4
		18.	Pengelolaan Cagar Budaya	PP 2	PN 4
2.	ENDE SEHAT	19.	Program dan Kegiatan terkait Pencapaian SPM berkenan	PP 2	PN 3
		20.	Dukungan Insentif bagi tenaga Kesehatan	PP 2	PN 3
		21.	Koordinasi Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	PP 2	PN 3
		22.	Koordinasi Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	PP 2	PN 3
		23.	Peningkatan Pelayanan RSUD Ende	PP 2	PN 3
		24.	Pengembangan RS Pratama	PP 2	PN 3
		25.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PP 2	PN 3

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		PRIORITAS PROVINSI (PD)	PRIORITAS NASIONAL (PN)
		26.	Penanganan Gizi melalui Upaya Pemasyarakatan Pangan Berbasis Kelor	PP 1	PN 3
		27.	Pemberian Makanan Tambahan	PP 1	PN 3
		28.	Pelayanan Stunting	PP 1	PN 3
		29.	Penyediaan Sarana Air Bersih	PP 1	PN 3
		30.	Pengembangan Sanitasi	PP 1	PN 3
		31.	Pelaksanaan Koordinasi Tim Penanggulangan Stunting Daerah	PP 1	PN 3
3.	PENGEMBANGAN PARIWISATA	32.	Penyelenggaraan Festival Danau Kelimutu (termasuk Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata, dan rangkaian even pendukungnya)	PP 3	PN 1
		33.	Penyelenggaraan Parade Kebangsaan	PP 3	PN 1
		34.	Pengembangan Geopark Kelimutu	PP 3	PN 1
		35.	Pengembangan Taman Monumen Pancasila Lampu Lima	PP 3	PN 1
		36.	Penataan Taman Renungan Bung Karno, Plaza, Perpustakaan Bung Karno	PP 3	PN 1
		37.	Pengembangan Wisata Kuliner Pesisir Pantai Ende	PP 3	PN 1
		38.	Pengembangan Wisata Gunung Meja	PP 3	PN 1
		39.	Pengembangan Wisata Minat Khusus Paralayang Kelimara	PP 3	PN 1
	4	40.	Pengembangan Industri Kecil	PD 4	PN 2
		41.	Pengembangan Koperasi	PD 4	PN 2
		42.	Penguatan Koordinasi Perdagangan Komoditas Masyarakat	PD 4	PN 2
		43.	Koordinasi Pengembangan BUMDes	PD 4	PN 2
		44.	Pengembangan Pasar	PD 4	PN 2
	5	45.	Pengembangan Promosi Potensi Daerah secara online	PD 5	PN 5
		46.	Optimalisasi Pelayanan Perijinan Online	PD 5	PN 5
6	PENGEMBANGAN SEKTOR DOMINAN	47.	Intensifikasi Lahan Usaha Tani	PD 4	PN 1
		48.	Pengembangan Saprodi untuk Petani	PD 4	PN 1
		49.	Pengembangan dan Bantuan Bibit Unggul	PD 4	PN 1
		50.	Pengembangan Pasca Produksi (Kemasan dan Pemasaran)	PD 4	PN 1
7	PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN	51.	Pelatihan dan Bantuan bagi Wirausaha Baru	PD 4	PN 1
8	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	52.	Penguatan Koordinasi TPID dan Tim Ekonomi Daerah	PD 4	PN 1
		53.	Pembangunan Rumah Layak Huni	PD 1	PN 2
9	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN EKONOMI	54.	Pembangunan Jaringan Irigasi	PD 1	PN 2
		55.	Pembangunan Jalan Paralel	PD 1	PN 2
		56.	Pembangunan Jalan Strategis	PD 1	PN 2
		57.	Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Ende	PD 1	PN 2
		58.	Pembangunan Jalan dan Drainase Dalam Kota Ende	PD 1	PN 2
		59.	Pengadaan TPA dan Operasional Pelayanan Sampah	PD 6	PN 6
10	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	60.	Koordinasi Pengembangan Listrik Perdesaan	PD 1	PN 2
		61.	Pembangunan Jalan Antar Desa dan Kecamatan	PD 1	PN 2
		62.	Koordinasi Penyusunan RKPDes	PD 1	PN 2
11	REFORMASI UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	63.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD serta Pengelolaan SIMDA Pendapatan	PD 5	PN 7
		64.	Pengelolaan SIMDA Keuangan	PD 5	PN 7
		65.	Penerapan E Planning	PD 5	PN 7
		66.	Peningkatkan Kualitas dan Kuantitas APIP	PD 5	PN 7
		67.	Pengembangan Layanan Informasi Pemerintah secara Online (e-Government)	PD 5	PN 7
		68.	Peningkatan Layanan Kependudukan dan Capil (Layanan Mobile KTP)	PD 5	PN 3

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		PRIORITAS PROVINSI (PD)	PRIORITAS NASIONAL (PN)
12	PENANGANAN MASALAH SOSIAL	69.	Optimalisasi RUPS	PD 5	PN 5
		70.	Optimalisasi LPSE	PD 5	PN 5
		71.	Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (8 Area RB)	PD 5	PN 7
		72.	Penanganan PMKS, Anak Terlantar, dll	PD 1	PN 3
		73.	Koordinasi Komda Lansia	PD 1	PN 3
		74.	Koordinasi Penanggulangan Permasalahan Sosial	PD 1	PN 3
		75.	Penanganan Bencana Daerah	PD 6	PN 6
		76.	Penguatan Koordinasi Pengendalian Keamanan & Ketentraman Lingkungan	PD 2	PN 7
		77.	Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	PD 2	PN 3
		78.	Koordinasi Kabupaten Layak Anak, dll.	PD 5	PN 3

4.2.4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Penurunan Stunting, Angka Kematian Bayi Ibu dan Angka Kematian Bayi

- Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Ende, dipriortaskan pembangunan tematik infrastruktur lintas sektor terkait yang berkaitan dengan: sektor air minum, sanitasi dan perumahan dan permukiman kumuh, serta pembangunan tematik sektor perekonomian lintas sektor, yang berkaitan dengan: Pertanian, Irigasi, Kelautan dan Perikanan, Jalan dan Ketahanan Pangan.
- Sementara itu untuk mengatasi permasalahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, difokuskan pada pembangunan sektor kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan promotif, preventif, dan kuratif serta didukung dengan pembangunan infrastruktur: air minum dan sanitasi.

KERANGKA KONSEP DAN STRATEGI PENURUNAN STUNTING dan KEMATIAN IBU & BAYI



4.2.5. Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Produk Lokal

Dalam rangka lebih menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang disebutkan dalam Inpres untuk:

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada K/L dan pemda.
6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan lima persen bagi K/L dan pemda yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Sektorial/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah (IKM)/artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi K/L dan pemda untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas, adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendukung capaian Program Pembangunan Daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada BAB IV, dirumuskan rencana program dan kegiatan prioritas yang menguraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan, Detail Lokasi, Pagu Indikatif, Prioritas dan Sasaran Daerah, Perkiraan Maju, dan Perangkat Daerah Penanggung jawab.

Rencana Kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, antara lain memuat pergeseran kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru/ alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan, dan kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Selain itu perubahan RKPD terjadi akibat adanya pengalokasian anggaran SiLPA untuk membayar kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, secara garis besar rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dirumuskan mengacu pada Kebijakan Keuangan sebagaimana telah disajikan pada BAB III.

Secara keseluruhan rincian Prioritas Program dan Kegiatan Kabupaten Ende pada Perubahan RKPD Tahun 2024, disajikan selengkapnya pada Lampiran 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Top Down Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB VI

PENUTUP

Sejalan dengan ketentuan penyusunan RKPD 2024, telah dilaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dimaksud, dan dengan melihat potensi SiLPA yang tersedia serta adanya kebutuhan yang mendesak, maka dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2024, yang mana perumusan prioritas program dan kegiatan, tetap dilaksanakan secara lebih terukur dan didasarkan pada kemampuan riil keuangan daerah yang tersedia.

Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan melibatkan seluruh pihak (partisipatif). Oleh karena itu diperlukan suatu langkah strategis yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 ini selanjutnya menjadi acuan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende Tahun 2024.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Perubahan RKPD merupakan hasil entri secara online dalam aplikasi SIPD-RI.
3. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh perangkat daerah dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani Perubahan RKPD ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka Perubahan RKPD ini, kecuali sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam regulasi yang mengaturnya.
4. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Perubahan APBD, Perubahan APBD Provinsi, Perubahan APBN dan PHLN serta sumber-sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi, dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya.
8. Perubahan RPKD Kabupaten Ende Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Ende untuk terus mendorong peran serta aktif dari seluruh pihak, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Selain itu optimalisasi reformasi birokrasi, melalui upaya-upaya kreatif dan inovatif oleh masing-masing perangkat daerah teknis terkait, harus terus didorong sehingga terjadi perubahan signifikan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi dalam **"PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM DAN PENURUNAN STUNTING, ANGKA KEMATIAN IBU SERTA ANGKA KEMATIAN BAYI MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN"**.

Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.



BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

